

CARA PANDANG

Inspirasi Terkini!

Edisi Oktober 2021

DUA TAHUN JOKOWI- MA'RUF MEMIMPIN



PUTAR OTAK
BANGKITKAN
EKONOMI NASIONAL

BERSAMA MERDEKA
BELAJAR, WUJUDKAN
SDM UNGGUL

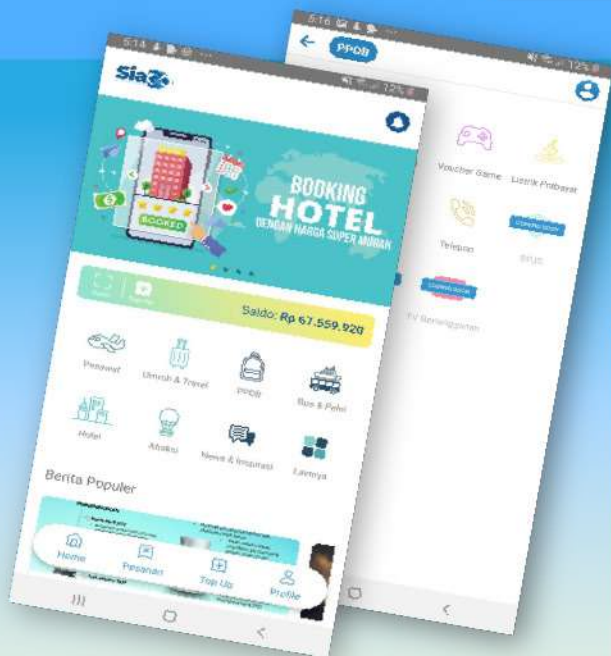
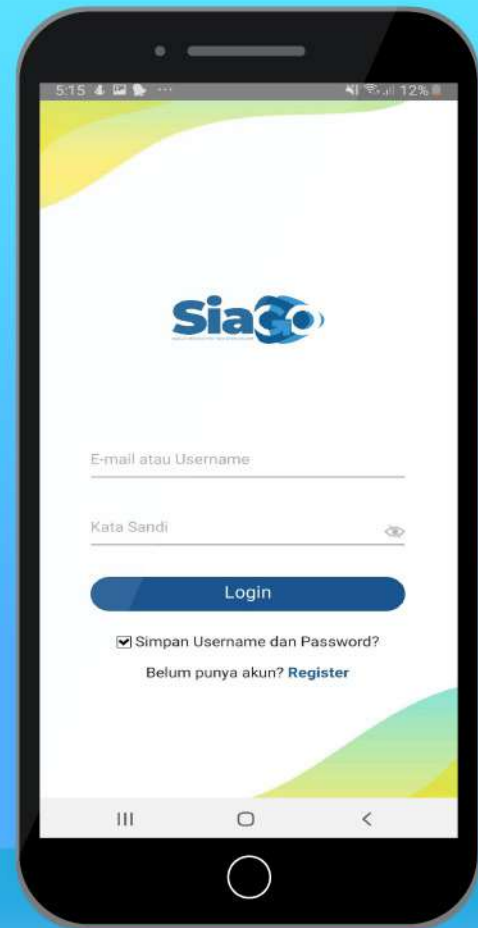
KOMPETISI USIA DINI,
MODAL KEMENANGAN
JABAR





Solusi Kemudahan Transaksi Online

SiaGO adalah platform pembayaran yang dibangun berdasarkan komitmen untuk memberikan solusi layanan pembayaran yang mudah bagi mitra kami



Memudahkan Pembayaran & Pembelian



Pesawat



Kapal Laut



Kereta Api
& Railink



Bus



Hotel



Pulsa Elektrik
& Paket Data



Voucher Game



PLN &
Token Listrik



Telepon



Internet



TV Berlangganan



PDAM



Multi Finance



BPJS Kesehatan

Customer Service



021 - 8276 0392



0812-1120-4801



www.sia.go.id



Siagoindonesia



Siago_indonesia



Siagoid



Siagoindonesia

DAFTAR ISI

TAJUK

DUA TAHUN JOKOWI-MA'RUF 5

LAPORAN UTAMA

PUTAR OTAK BANGKITKAN
EKONOMI NASIONAL 10
MEMASTIKAN KEBERLANGSUNGAN
PENDIDIKAN 12

LAPORAN KHUSUS

MENYOAL NAMA LUHUT
DI PANDORA PAPERS 16
LORD DI PUSARAN TAMBANG EMAS 18

NASIONAL

TANDA BELUM AKIL-BALIG
KLAIM GUS YAQUT 26
PRAKTIK MERESAHKAN
PINJAMAN ONLINE 34
KOMPETISI USIA DINI,
MODAL KEMENANGAN JABAR 38

INTERNASIONAL

KORUT UJI COBA RUDAL BALISTIK,
SEMENANJUNG KOREA MENEGANG 44

OPINI

ASAL USUL DAN MASA DEPAN
KEMENTERIAN AGAMA 30
MENJAGA POLITIK MORAL BANGSA 48
UMKM DIGITAL,
BERTAHAN DI TENGAH BADAI KRISIS 50

RESENSI

PERJUANGAN MENGEJAR MIMPI 52

FILM

NO TIME TO DIE: AKHIR CERITA
AKSI DANIEL CRAIGH 54

BUDAYA

MELESTARIKAN SENI
PERTUNJUKAN WAYANG 56

BAHASA

SATU KATA, BERAGAM BUDAYA 58

ARTIS

BEDAH RUMAH,
IMPIAN ASHANTY SEJAK LAMA 60



LAPORAN UTAMA

DUA TAHUN JOKOWI-MA'RUF:

HARGA MAHAL STABILITAS POLITIK

Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf per 20 Oktober 2021 genap berusia dua tahun. Seperti peribahasa "tak ada gading yang tak retak", kerja presiden dan wakil presiden yang selama ini ditorehkan dalam berbagai kebijakan tak selamanya diapresiasi.

6



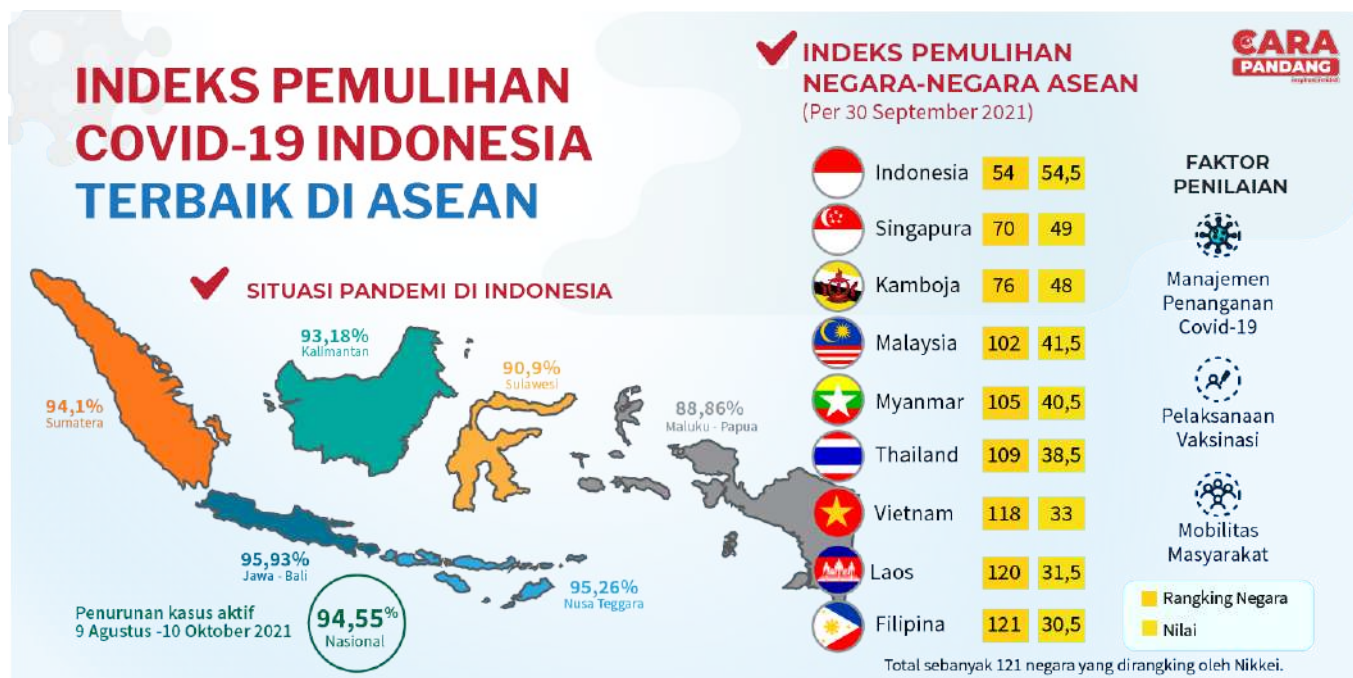
NASIONAL
KEKOMPAKAN,
KUNCI SUKSES
KEMENANGAN 42



INTERNASIONAL
JEBAKAN UTANG
NEGERI PANDA 46

ARTIS
ISU RETAK
KELUARGA
SHANDY
62





Menggenjot Program Vaksinasi

Tren penyebaran Covid-19 saat ini tengah mengalami penurunan. Terlihat dari angka *positivity rate* yang berada di bawah 2%. *Our World In Data* mencatat bahwa *positivity rate* harian Covid-19 per 11 Oktober 2021 mencapai 1,50%. Angka ini di bawah standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO) yakni di bawah 5%.

Capaian tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat terendah di Asia Tenggara. Tentu, dengan data yang disajikan tersebut kita merasa senang. Akan tetapi, point selanjutnya adalah bagaimana agar tren penurunan ini bertahan atau bahkan bisa menurun ke level aman.

Untuk melangkah ke arah tersebut memerlukan upaya masif dari berbagai

elemen bangsa, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satunya dengan terus mengampanyekan dan menggenjot vaksinasi massal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu juga tetap memperbanyak pemeriksaan spesimen, meningkatkan jumlah pelacakan, dan mengakkan ketaatan protokol kesehatan. Faktor-faktor tersebut adalah kunci untuk kita dapat bertahan dari pandemi Covid-19.

Menurunya tren penyebaran Covid-19 di Indonesia terjadi karena banyak masyarakat yang mulai disiplin dan mau mengikuti program vaksinasi. Meskipun demikian jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Karena, tidak menutup kemungkinan gelombang penyebaran covid-19 ini

akan kembali meningkat.

Mengingat Covid-19 adalah makhluk dengan spesifikasi tertentu, yang juga mempunyai mekanisme bermutasi untuk mempertahankan hidup. Hal ini dapat kita ketahui dengan munculnya beberapa varian baru seperti lambda, mu, dan C.1.2.

Maka dari itu, untuk menghindari kembali gelombang Covid-19 pemerintah maupun masyarakat benar-benar menekankan program vaksinasi yang telah terbukti menimbulkan efek baik. Meskipun pandemi belum terprediksi kapan akan berakhir, setidaknya ini adalah ikhtiar kita bersama untuk dapat bertahan dari ganasnya Covid-19.

Hakam Mufti Aji, Jakarta



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, Faozan Amar

Pemimpin Perusahaan: Zulfikar Rachman **Penanggung Jawab:** Yayan Sopyani, Michael Malik **Pemimpin Redaksi:** Nafik Muthohirin **Redaktur Pelaksana:** Amir Fiqi, Zainal Arifin **Redaktur:** Robby Firmansyah, Habibi Khasim, Ridwan **Desain Grafis:** Hengki, Dwi Saputra, Soki Rahman Wardi, Taqi khana **IT:** Zulfikar Iskandar **Fotografer:** Robby Firmansyah, Jirga **Reporter:** Ika, Amir, Aldi, Edi, Afi, Marshal, Malik, Ridwan, Zildan Syauqi **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayat

Alamat Redaksi

Jalan Tebet Dalam IV Nomor 7B, RT 11/RW 01, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12081 Telp: (021) 21383521

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi

DUA TAHUN JOKOWI-MA'RUF

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin kini genap berusia dua tahun. Banyak publik yang menilai kinerja pemerintahan Jokowi layak untuk diapresiasi. Namun, banyak juga catatan-catatan kritis yang mesti dibenahi. Hasil survey dari Poltracking menunjukkan 68,4 persen responden merasa puas terhadap Jokowi dengan rincian 63,1 persen cukup puas dan 5,3 persen sangat puas.

Sementara, tingkat kepuasan terhadap Ma'ruf Amin lebih rendah dengan rincian 60,3 persen. Kinerja wapres dalam berbagai survei juga menunjukkan angka yang rendah. Jelas menjadi pertanyaan umum peran apa saja yang telah dilakukan Ma'ruf Amin di tahun keduanya. Terutama Ketika pandemi berlangsung banyak masyarakat yang tidak merasakan kehadirannya.

Apabila melihat perbandingan dengan pemerintahan Jokowi di awal dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden tentu sangat jauh. Jusuf Kalla tampil seimbang dengan presiden dimana dalam berbagai forum internasional dan nasional mencuak di publik. Banyak isu-isu yang dikuasai dan menjelaskan dengan baik kepada masyarakat.

Melihat fenomena kinerja Ma'ruf Amin sekarang jelas sangat berbeda dengan Jusuf Kalla saat itu. Apakah karena faktor usia, atau karena orang di sekitar yang mengelola isu tidak memberi porsi lebih kepada Ma'ruf Amin terutama dalam pemberitaan media massa. Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di publik dalam mengevaluasi kinerja pemerintah di tahun kedua.

Minimnya keterlibatan Ma'ruf Amin dalam peran-peran strategis pemerintahan, memperlihatkan bahwa memang keterpilihannya sebagai Wapres tak lebih sebagai peredam menguatnya politik identitas keagamaan jelang Pilpres 2019, terutama ditandai dengan munculnya Gerakan atau Aksi 212 yang berjilid-jilid.

Aksi-aksi tersebut mengkampanyekan bahwasanya para pemimpin umat haruslah beragama Islam serta mengisyaratkan jangan memilih pemimpin yang akan merusak Islam. Saat itu, Ma'ruf Amin merupakan salah satu tokoh yang juga memobilisasi masa dengan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian, Ketika pemilihan presiden berlangsung nama Ma'ruf Amin seketika muncul dalam bursa pencalonan Wakil Presiden bersama dengan Mahfud MD.

Dengan waktu yang relatif singkat, pada akhirnya Jokowi lebih memilih Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Hal ini kemudian banyak yang menilai langkah politik Jokowi sangat pragmatis. Ma'ruf Amin dipandang mampu "membungkam" suara-suara kelompok

Islam yang konsisten menyerang Jokowi sebagai sosok yang anti-ulama.

Dari sini kemudian masyarakat banyak yang menilai kinerja Ma'ruf Amin tidak maksimal karena hanya menjadi "ban serep". Seharusnya, sebagai Ma'ruf bias tampil menjadi pelengkap dan kehadirannya bisa dirasakan masyarakat dalam berbagai isu strategis pemerintahan. Semoga di sisa jabatannya peran-peran strategis dapat menjadi fokus utama dan meningkatkan kinerja Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. ■





DUA TAHUN JOKOWI-MA'RUF:

HARGA MAHAL STABILITAS POLITIK

Berbanding terbalik dengan stabilitas politik, dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf justru menunjukkan konsolidasi yang begitu kuat. Tak hanya partai pendukung, beberapa oposisi pun turut menduduki kursi kekuasaan.

Gagasan besar demokrasi berbasis *check and balances* kian menjadi persoalan, apakah fungsi kritik lembaga legislatif terhadap pemerintah akan melemah? Bahkan, apakah menguatnya stabilitas politik berbanding terbalik dengan melemahnya demokrasi dan keamanan negara?

Akomodatif atau Transaksional?

Lintasan sejarah mencatat bahwa sejak periode pertama, kepemimpinan Jokowi cenderung akomodatif terhadap koalisi partai politik pendukung dan tim suksesnya. Dikutip dari 'Analisis CSIS', Agustino (2015) setidaknya mengidentifikasi bahwa lebih



Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf per 20 Oktober 2021
genap berusia dua tahun. Seperti peribahasa "tak ada gading yang tak retak", kerja presiden dan wakil presiden yang selama ini ditorehkan dalam berbagai kebijakan tak selamanya diapresiasi. Alih-alih mengalami kemajuan, sejumlah elemen masyarakat menilai beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara justru menunjukkan kemunduran. Pada aspek demokrasi dan penegakan hukum, misalnya, pemerintah harus bertaruk dengan "biaya mahal" atas nama stabilitas politik dan keamanan nasional.

dari 44% susunan menteri dan wakil menteri pada periode pertama Jokowi diisi oleh golongan partai politik.

Selain itu, beberapa posisi komisaris BUMN seperti BNI, Bank Mandiri, PGN, Krakatau Steel, Telkom, dan lain sebagainya turut diisi oleh para relawan.

Memasuki periode kedua, susunan personalia dengan latar belakang partai politik dalam Kabinet Indonesia Maju pun tak jauh berbeda. Dari total 34 menteri, 16 di antaranya dilatarbelakangi oleh partai politik. Angka ini tentu tidak terlalu fantastis, mengingat hanya ada penambahan satu orang, namun lain soal jika melihat posisi wakil menteri. Semula pada periode pertama hanya tiga orang, memasuki awal periode kedua 12 orang, hingga kini bertambah lagi

menjadi 15 orang.

Akan sulit dibayangkan bagaimana kondisi saling kontrol antara pemerintah dan DPR, mengingat bahkan ketua partai seperti Prabowo yang dahulunya menjadi lawan politik Jokowi, kini malah masuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Saat ini, dari total 575 kursi di DPR, hanya 104 (18,09%) anggota berstatus partai oposisi, yakni PKS dan Demokrat.

Contoh nyata dapat terlihat dari rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan presiden dan dibahas DPR secara kilat, publik tentu masih mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). RUU Cipta Kerja diusulkan oleh presiden kepada DPR pada tanggal 7 Februari 2020, dibahas pertama kali oleh DPR pada 2 April 2020, kemudian

disahkan 5 Oktober 2020. Berbeda dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sudah diajukan sejak 2014, bahkan hingga kini tak kunjung mendapatkan kejelasan di DPR.

Stabilitas politik yang tinggi berkat terakomodirnya mayoritas partai politik dalam satu koalisi oleh Efriza (2016) dalam artikel *Sistem Presidensial Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Studi Kasus Kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi* sebagai politik transaksional yang tidak mengenal istilah 'gratis saat makan siang'.

Hubungan resiprokal saling menguntungkan antara jabatan kementerian dengan pengambilan keputusan di DPR pun dapat dibangun secara masif.

Namun demikian, stabilitas politik ini pun memiliki 'harga yang pantas dibayar' setimpal dengan



■ Haris Azhar

keuntungannya. Aspek demokrasi dan keamanan negara pada dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf terlihat mengalami kemunduran yang signifikan.

Kemunduran Demokrasi

Harga pertama yang pantas dibayar oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah kemerosotan demokrasi. Slogan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dipertanyakan, sebab terlalu banyak kepentingan yang bermain hanya untuk menstabilkan jalannya kemungkinan polemik yang akan terjadi saat menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Idul Rishan (2020) menjelaskan, ia meramalkan bahwa pemerintahan akan berjalan pincang tanpa ada sistem kontrol, mudah terperosok dalam keotoriteran, serta menutup upaya kritik di luar koalisi besar tersebut.

Tampaknya ramalan tersebut mulai menunjukkan kebenarannya, dikutip dari The Economist Intelligence Unit (EIU) (2021), dalam laporannya mendudukkan Indonesia pada peringkat ke-64 dari 167 negara dengan status *flawed democracies* (demokrasi yang cacat).

Kendati tetap berada pada urutan yang sama, nilai indeks demokrasi



■ Fatia Maulidiyanti

Indonesia ternyata berada pada posisi paling rendah sepanjang 14 tahun terakhir, yakni 6,3. Dari lima variabel yang dijadikan tolok ukur, satu di antaranya begitu memprihatinkan, yakni aspek budaya politik yang nilainya bahkan tidak menjangkau rata-rata dunia.

Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Litbang Kompas (2021) juga mencatat, kontribusi pemerintah dalam mensosialisasikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat hanya 14%.

Tak heran, jika masih banyak masyarakat yang takut untuk berpendapat di hadapan publik, secara spesifik, dari 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, 29% di antaranya takut mengkritik pemerintah, 26% responden takut membawa atribut tertentu yang rentan dianggap sebagai kritik, serta 36,2% responden takut menyampaikan pendapat melalui media internet.

Fungsi Keamanan

Khazanah ketatanegaraan,



membedakan antara fungsi pertahanan dan keamanan. Pada diksi yang pertama berada pada kewenangan TNI, sedangkan diksi kedua berada pada Polri. Hal ini turut dijelaskan pada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa *“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”*.

Menurunnya kualitas pada aspek keamanan negara, tak melulu soal negara yang tidak aman dari serangkaian kejahatan. Sesuai fungsi dan peran Polri, dewasa ini masyarakat mengeluh atas tindakan yang cenderung ‘garang’ terhadap pengkritik pemangku kekuasaan dan arogansi oknum-oknum polisi.



“Jika pemerintah berkomitmen pada penegakan hukum yang berkeadilan, seharusnya *buzzer* yang menyerang berbagai isu talibanisme di KPK ditertibkan, bukan mereka yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah.”

■ **Usman Hamid,**
Direktur Eksekutif Amnesty
International Indonesia



Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pada siniar resmi CNN Indonesia (20/10) menyebutkan, jika pemerintah berkomitmen pada penegakan hukum yang berkeadilan, seharusnya *buzzer* yang menyerang berbagai isu talibanisme di KPK ditertibkan, bukan mereka yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

Pemangku kekuasaan di lingkaran Jokowi tidak sepatasnya malah mengkriminalisasikan pengkritik yang berusaha mengimplementasikan hak atas kebebasan berekspresinya. Seperti yang diketahui belakangan, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan sebab diskusi yang menyebutkan bahwa Luhut turut campur tangan dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

Padahal, konteks yang didiskusikan oleh kedua aktivis tersebut adalah bahayanya konflik kepentingan seorang pebisnis yang juga pemangku kebijakan.

Selain itu, Polri oleh masyarakat luas dianggap begitu arogan, sebab

beberapa oknum di lapangan cenderung main hakim sendiri. Belakangan ini telah terjadi peristiwa seorang polisi membanting gaya ‘smackdown’ pada salah satu pendemo mahasiswa di halaman Kantor Bupati Tangerang.

Lalu, juga ada kasus oknum polisi merebut dan memeriksa telepon genggam warga secara paksa. Kasus lain seperti meninggalnya enam anggota laskar FPI dalam kasus pembunuhan di luar hukum oleh oknum kepolisian (*unlawfull killing*), serta pemberhentian penyidikan kasus dugaan kejahatan seksual seorang ayah terhadap tiga anaknya di Luwu Timur.

Serangkaian problematika ini mengantarkan Polri pada citra yang tidak humanis dan profesional, setidaknya sepanjang Oktober ini telah tenar tagar yang mengkritik Polri dengan tagar *“#percumalapropolisi”* dan *“#satpamBCA”* yang membandingkan bahwa satpam bank lebih baik dalam melayani masyarakat.

■ **Nabil**

PUTAR OTAK BANGKITKAN EKONOMI NASIONAL



■ Airlangga Hartanto



■ Melkiades Laka Lena

Ketika baru lima bulan pasca pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia diterpa pandemi Covid-19. Praktis, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf harus memutar otak untuk mengendalikan penyebaran virus yang mematikan tersebut. Pasalnya, tak hanya faktor kesehatan publik yang diserang, tetapi ekonomi dan pendidikan menjadi dua sektor nasional yang juga terdampak paling serius selama kurang lebih dua tahun terakhir.

Bersyukur, dua bulan terakhir, pasca gelombang kedua Covid-19 menyerang negeri ini, ekonomi nasional kembali stabil. Sebelumnya, ekonomi Indonesia sempat berkontraksi dan mengalami penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional hanya tumbuh mencapai 0,74 persen pada kuartal I 2021.

Kemampuan Kabinet Indonesia Maju (KIM) mengembalikan situasi ekonomi pasca pandemi tersebut diapresiasi Partai Golkar. Pemerintah dinilai berhasil menunjukkan optimisme ekonomi nasional setelah

terpuruk beberapa saat akibat gelombang kedua Covid 19 yang mematikan.

“Presiden dan Wakil Presiden telah menunjukkan keberhasilan menjawab tantangan pandemi Covid-19. Angka kematian terus turun, begitu juga dengan jumlah masyarakat yang positif terinfeksi terus merosot, sehingga kondisi ini membuat sektor ekonomi kita positif,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Melkiades Laka Lena dalam konferensi pers *Dua Tahun Pemerintahan Joko Widodo*, di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, jum’at (22/10).

Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53 persen.

Untuk mengendalikan kontraksi ekonomi agar tak semakin jatuh, pemerintah mengupayakan berbagai strategi meningkatkan perekonomian dalam negeri. Setelah melewati banyak proses dan hambatan akibat Covid-19, akhirnya membuahkan hasil positif. Data BPS kuartal II 2021 menunjukkan ekonomi nasional mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (y-on-y).

Hal ini terjadi karena pemerintah telah memberikan banyak stimulus dan insentif seperti bantuan untuk pelaku UMKM, pinjaman kredit, insentif fiskal dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah memanfaatkan teknologi untuk dapat dimaksimalkan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi.

Ketika pandemi melanda dunia, transaksi banyak terhenti yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun. Namun, akibat kemajuan teknologi yang semakin canggih semua itu dapat tergantikan meskipun dari tempat-tempat yang terbatas.

Saat ini, jumlah pengguna ponsel Indonesia mencapai 345,3 juta

(125,6% dari total populasi) dengan penetrasi internet sebesar 73,7% dan trafik internet yang mengalami peningkatan 15-20% di sepanjang tahun 2020. Bahkan saat ini, telah muncul gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, IoT, *blockchain*, *artificial intelligence* dan *cloud computing*.

Meningkatnya jumlah pengguna internet tersebut juga dibarengi dengan berbagai aplikasi jual beli *on line* yang saat ini semakin merebak. Tentu, ini adalah peluang ekonomi digital untuk dapat menyokong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hartarto memaparkan, perdagangan digital akan tumbuh sebesar 33,2% dari tahun 2020 menjadi Rp337 triliun tahun ini. Sementara transaksi *digital banking* diproyeksikan meningkat sebesar Rp32 triliun atau tumbuh 19,1% pada tahun 2021.

Selain itu, *Google*, *Temasek*, *Bain & Company* memproyeksikan, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai USD124 miliar atau Rp1.700 triliun pada 2025. Untuk itu, Airlangga optimis bahwa Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut.

Dalam memanfaatkan peluang ini, tentu strategi nasional ekonomi digital harus didukung semua pihak karena akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peluang Ekonomi Kreatif

Pandemi yang masih terus berlangsung sangat memukul perekonomian dunia termasuk Indonesia terutama dalam sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Padahal, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, sektor ekonomi kreatif dan pariwisata

Indonesia berada pada peringkat tiga setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Padahal, kata Sandiaga, sektor tersebut menyumbangkan Rp11 ribu triliun dan menawarkan 20 juta pekerjaan berkualitas untuk generasi muda. Namun, akibat pandemi Covid-19 ekonomi kreatif dan pariwisata sangat terdampak. Akhirnya, sektor ini mengalami banyak kerugian sehingga para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata terancam kehilangan pekerjaan.

Meski saat ini pandemi masih belum menunjukkan akan segera berakhir, namun situasi ini bukan

Pandemi masih belum menunjukkan akan segera berakhir, namun situasi ini bukan merupakan penghalang untuk bisa melewati tantangan dan beradaptasi.

- Sandiaga Uno



merupakan penghalang untuk bisa melewati tantangan dan beradaptasi. Untuk mengatasi masalah yang sangat pelik ini, berbagai elemen harus saling berkolaborasi dan berinovasi dalam memperkuat ekonomi kreatif dan pariwisata.

Melalui Kemenparekraf, beberapa program mulai dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini, seperti halnya memberikan bimbingan untuk bisa memasarkan produk secara daring bagi para pelaku ekonomi kreatif. Tujuannya, agar mulai beradaptasi dengan teknologi dalam memasarkan produk-produk tersebut.

Selain itu, program lain yang dilakukan Kemenparekraf yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia dalam sektor ekonomi kreatif dengan memunculkan program *#BeliKreatifLokal*.

Mengutip dari data Kemenparekraf, program *#BeliKreatifLokal* sangat positif dan membawa dampak signifikan bagi banyak pelaku ekonomi kreatif. Program yang dijalankan sejak April 2020, telah banyak berhasil menyerap 6.738 tenaga kerja, serta berhasil membangun kolaborasi dengan 6 *e-commerce* dan 2 jasa transportasi daring.

Kemenparekraf juga memberikan bantuan berupa alokasi hibah sesuai program pemulihan ekonomi nasional seperti stimulus kredit ekonomi dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Usaha Mikro (UMi), relaksasi pajak, dan penjaminan korporasi padat karya.

Berbagai program di atas merupakan kolaborasi dan inovasi yang saat ini terus dilakukan pemerintah. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat terutama yang terdampak Covid-19. ■

Aldi



MEMASTIKAN KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menghadapi tantangan serius selama masa pandemi kurang lebih dua tahun ke belakang ini. Melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berbagai strategi dihadirkan demi memastikan keberlangsungan proses pembelajaran di masa krisis ini.

Proses pembelajaran dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga PT (Perguruan Tinggi) tetap berjalan di masa pandemi. Keberlangsungan sektor Pendidikan tetap terjaga, hanya berganti dari sisi pendekatannya. Jika pada kondisi normal, proses pembelajaran dilakukan di kelas secara langsung, namun situasi pandemi ini menyebabkan pembelajaran berlangsung melalui dalam jaringan (daring) dari rumah.

Bahkan, belakangan, kegiatan belajar-mengajar di beberapa tempat sudah diberlakukan pembelajaran tatap muka. Situasi ini menunjukkan optimisme pemerintah untuk semakin mampu mengendalikan dan menurunkan persebaran Covid-19.

“Pandemi harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dunia pendidikan. Koreksi total dunia pendidikan kita. Pandemi jangan jadi penghalang untuk mencapai kemajuan,” ujar Presiden Jokowi, seperti ditayangkan di kanal *YouTube Sekretariat Presiden*, Minggu (2/6).

Pernyataan presiden tersebut juga direspons oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim melalui beberapa strategi untuk memastikan keberlangsungan dunia pendidikan di masa pandemi.

Melalui Kemendikbud Ristek, KIM menghadirkan terobosan di bidang pendidikan dalam program *Merdeka Belajar* sepanjang 2020. Program ini diawali dengan upaya Kemendikbud Ristek menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan di antaranya menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan mengatur kembali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut menjadi arah pembelajaran yang fokus pada arahan presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.

Seperti diketahui bersama, sebelum adanya penyederhanaan RPP dan penggantian UN, guru terbelenggu oleh banyaknya administrasi pembelajaran. Seperti halnya dirasakan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pakem, Jawa Tengah, Tri Worosetyaningsih.

Dia mengatakan, dampak positif setelah adanya penyederhanaan RPP dan penghapusan atau penggantian UN, para guru menjadi tidak lagi terbebani dengan administrasi yang menumpuk. Mereka menjadi lebih punya ide kreatif dan inovatif. Di samping itu, peserta didik juga bisa belajar dalam suasana hati yang menyenangkan.

Selain itu, pada awal terjadi pandemi Covid-19, Kemendikbud Ristek juga meluncurkan Program “Belajar dari Rumah” di TVRI. Program *Belajar dari Rumah* merupakan respons cepat Kemdikbud Ristek terhadap masukan Komisi X DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 27 Maret 2020.

Adapun materi pembelajaran yang disajikan berfokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta penumbuhan karakter peserta didik. Program ini semata mewadahi peserta didik maupun pendidik yang tidak bisa mengakses platform pembelajaran daring secara optimal.

Selain itu, di bulan yang sama, Kemdikbud Ristek juga mengeluarkan kebijakan pembatalan ujian nasional. Sementara itu, sekolah yang

belum melaksanakan ujian dapat menggunakan nilai lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan peserta didik.

Penyediaan Kuota Gratis

Bantuan kuota internet diberikan untuk menunjang Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh kepada siswa dan tenaga pengajar dari PAUD hingga perguruan tinggi.

Bulan Maret s.d. April 2020, Kemendikbud Ristek melakukan penyediaan kuota gratis, realokasi anggaran Pendidikan Tinggi sebesar Rp405 milyar untuk Rumah Sakit Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, realokasi anggaran Kebudayaan Rp70 milyar untuk kegiatan Belajar dari Rumah melalui TVRI, peluncuran portal Guru Berbagi, relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran honor guru, serta pembelajaran daring.

Pada Mei hingga Juni 2020, Kemendikbud Ristek memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 410 ribu mahasiswa, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta (bukan hanya sekolah negeri). Pada bulan Juli s.d. Agustus 2020, sekolah di zona hijau dan kuning diperbolehkan melakukan pembukaan kembali, zona lain masih dilarang, peluncuran kurikulum dalam kondisi khusus, dan Pemberian modul pembelajaran bagi PAUD dan SD.

Kemendikbud juga memberikan bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan (September s.d. Desember 2020). Besaran bantuan, siswa 35 GB/bulan, guru 42 GB/bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan.

Saat ini, Kemdikbud Ristek juga

telah membuka tambahan kuota internet. Pada September 2021, terdapat tambahan kuota internet dengan dana sebesar Rp2,3 triliun.

Bantuan UKT untuk Mahasiswa

Kemdikbud Ristek bersama Kemenkeu dan Kemennag memastikan tidak akan ada mahasiswa yang putus kuliah karena tak mampu membayar UKT akibat terdampak covid-19. Pada tahun 2020 dan 2021 telah menyalurkan bantuan sebesar Rp13,2 triliun serta menerjunkan 53.706 relawan mahasiswa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

“Bantuan tersebut terdiri dari bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal (UKT). Pada tahun 2020 bantuan kuota data internet telah menyasar kepada 35,6 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, dilanjutkan anggaran bantuan kuota data internet pada tahun 2021 mencapai Rp6,8 triliun yang diperuntukkan bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen,” terang Nadiem.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian lanjutan Bantuan Kuota Data Internet dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2021, secara daring, di Jakarta, pada Rabu (4/8).

Sementara itu, terkait bantuan UKT pada 2020-2021, total anggaran yang diberikan mencapai Rp2 triliun yang diperuntukkan bagi 419.605 mahasiswa PTN dan PTS yang terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, Kemendikbud Ristek juga memberikan bantuan subsidi upah dengan total anggaran sebesar Rp3,7 triliun bagi 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS serta 48 ribu pelaku seni budaya. Serta menyediakan total anggaran sebesar Rp405 miliar



untuk Rumah Sakit Pendidikan yang bertujuan meningkatkan kapasitas 30 rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran PTN dan PTS, fasilitasi APD, reagen dan alat deteksi Covid-19 dengan RT-PCR.

Mulai bulan September 2021, Kemendikbud Ristek juga akan menyalurkan Rp745 miliar untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19. Bantuan UKT diberikan sesuai besaran UKT (at

cost), dengan batas maksimal Rp2,4 juta. Jika UKT lebih besar dari Rp2,4 juta, selisihnya menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai kondisi mahasiswa.

“Bantuan UKT menyasar kepada mahasiswa yang aktif kuliah, bukan penerima KIP Kuliah/ Bidikmisi, serta kondisi keuangannya memerlukan bantuan UKT pada semester ganjil tahun 2021,” jelas Menteri Nadiem.

Bagi mahasiswa yang memerlukan



bantuan UKT diharapkan segera mendaftarkan diri ke pimpinan perguruan tinggi untuk diajukan sebagai penerima bantuan ke Kemendikbudristek. Nantinya, bantuan UKT akan disalurkan Kemendikbudristek langsung ke perguruan tinggi masing-masing.

Guru Belajar dan Berbagi

Pada masa pandemi ini, Kemdikbud Ristek juga mengeluarkan program

Ayo Guru Berbagi, sebuah ruang gotong royong bagi guru dan penggerak pendidikan untuk saling berbagi praktik dan RPP. Dalam platform ini, para guru dapat menemukan referensi dan artikel tentang pembelajaran jarak jauh dan daring. Di dalamnya ada *Ruang Aksi* sebagai sarana belajar bersama rekan guru yang lain.

Sementara itu, *Program Guru Belajar dan Berbagi* seri *Guru Merdeka Belajar* dirancang untuk menjawab persoalan

yang dirasakan guru dalam menjalani profesinya. Guru seringkali memiliki banyak tugas dan tanggung jawab, baik yang terkait dengan pembelajaran maupun administrasi.

Program tersebut juga dirancang bagi para guru yang merasa kelelahan dan merasa tidak berkembang kariernya meskipun sudah mengajar bertahun-tahun. Program *Guru Belajar dan Berbagi* Seri *Guru Merdeka Belajar* adalah program yang bertujuan untuk membantu guru mendapatkan kunci pengembangan diri: kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi dan karier.

Terus berbenah

Saat ini, Kemendikbud Ristek akan melanjutkan transformasi pendidikan dan pemajuan kebudayaan. Dalam siaran pers di *Youtube Official Kemdikbud Ristek RI*, Nadiem menjelaskan, strategi transformasi yang begitu besar dan kerja yang tak kenal henti mungkin disalahartikan sebagai tidak fokusnya upaya transformasi. Namun, jika dipahami lebih dalam, semua yang dikerjakan Kemendikbud menasar pada pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan empat strategi utama kementeriannya, yaitu: *Pertama*, pembangunan infrastruktur dan teknologi; *Kedua*, penguatan kebijakan, prosedur, dan pendanaan; *Ketiga*, penguatan kepemimpinan, masyarakat, dan kebudayaan; dan *keempat*, penguatan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

“Semua kebijakan Kemendikbud Ristek berujung pada upaya menghadirkan transformasi yang bermakna dan membawa bangsa ini kepada kemajuan,” tegas Nadiem.

■ Ika

MENYOAL NAMA LUHUT DI PANDORA PAPERS

Modus penggelapan pajak kembali terulang pada pejabat publik. Mereka menyimpan kekayaan di perusahaan luar negeri untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Nama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kembali disebut. Dua kali tersangkut kasus yang sama, dua kali juga lolos dan tak ada kejelasan tindakan hukum terhadapnya.



Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali muncul di pemberitaan publik terkait dugaan skandal bisnis dan keuangan dalam dokumen Pandora Papers, sebuah laporan berupa dokumen, email, foto yang mengungkap penggelapan pajak dan harta tersembunyi dari orang-orang terkaya di dunia.

Situs resmi *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) melaporkan ada sekitar 2,95 terabyte data bisnis para elite dunia. Data-data tersebut merupakan temuan dari 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara. Isi dokumen tersebut banyak menyingkap harta rahasia, menghindari pajak, dan

menyembunyikan aset para elit global dari 200 negara di dunia mulai dari pejabat publik, politisi, dan selebritas.

Mereka memanfaatkan negara-negara yang menyediakan *tax heaven* (surga pajak) untuk menyembunyikan aset, mempermudah transaksi dan menghindari pungutan pajak. Laporan serupa juga pernah terjadi pada 2016, yaitu Panama Papers yang menyingkap sebanyak 11,5 juta data dari firma hukum Mossack Fonseca yang bocor.

Melansir *Tempo*, Luhut Pandjaitan terseret namanya karena pernah menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama. Luhut hadir dalam beberapa pertemuan yang berlangsung selama 2007-2010. Pandora Papers menyebutkan,

Luhut ditunjuk sebagai Presiden Direktur Petrocapital dalam rapat yang diselenggarakan pada 19 Maret 2007.

Sedangkan, dalam dokumen Firma Hukum Mossack Fonseca yang bocor lima tahun lalu, Luhut disebut sebagai direktur Mayfair Internasional Ltd, perusahaan cangkang asal Republik Seychelles, Negara suaka pajak Amerika Serikat.

Penelusuran dokumen Panama Papers 2016 telah menemukan nama Pemilik Mayfair adalah dua perusahaan yakni PT Persada Inti Energi dan PT Benua Inti Energi. Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai satu-satunya direktur di Mayfair. Sertifikat penunjukan direksi tersebut Luhut dinyatakan beralamat di Jalan Mega Kuningan Barat III Nomor 11,

Jakarta.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi membenarkan bahwa Luhut pernah menjabat sebagai Direktur Utama Petrocapital SA pada 2007 hingga 2010. Namun, karena berbagai kendala Luhut memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.

Luhut juga telah membantah laporan namanya di Panama Papers. Dia mengakui, telah melepas semua jabatan di perusahaan yang namanya tercantum dalam laporan tersebut sejak 2014. Kekayaan yang dimiliki Luhut juga telah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LJKPN) secara transparan.

Selain Luhut, nama-nama yang terungkap dalam Pandora Papers sangat banyak. Mulai dari banker, pedagang senjata, artis, politikus, atlet dan lainnya.

Menyembunyikan Harta Kekayaan

Meskipun kasus tersebut belum ada kepastian hukumnya apakah Luhut terlibat atau tidak, namun lembaga yang berwenang untuk kasus ini seharusnya mengusut



■ Bhima Yudhistira

secara mendalam. Skandal tentang menyembunyikan harta kekayaan dan menghindari pajak dalam kasus ilegal adalah tindakan yang tidak lazim. Kebocoran data-data itu jelas memperlihatkan bahwa segelintir orang kaya enggan untuk membayar pajak yang bisa berkontribusi untuk kepentingan masyarakat banyak.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, data-data yang terungkap dari Pandora dan Panama Papers tidak bisa dianggap angin berlalu. Sikap elit politik yang menaruh dana dalam jumlah besar di negara bebas pajak termasuk penggelapan pajak.

“Penggelapan pajak di dalam dokumen Pandora Papers telah berkontribusi pada rendahnya rasio pajak di Indonesia,” ungkap Bhima dikutip dari *JPN.com*.

Bhima menambahkan, pengusaha telah mengambil sumber daya alam Indonesia, akan tetapi hasilnya justru dibawa lari ke luar negeri dan tidak disimpan di dalam negeri. Seharusnya, dia wajib membayar pajak penghasilan sebesar 25%, tetapi di Bahama nol persen. Artinya, negara kehilangan penerimaan yang besar. Ini adalah penggelapan pajak dan problem serius bagi penegakan kepatuhan perpajakan.

“Penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan memanfaatkan perusahaan cangkang di luar negeri bisa dipidanakan,” kata Bhima.

Tentu hal semacam ini menimbulkan ketidakadilan. Negara-negara yang menjadi surga pajak tempat di mana harta kekayaan banyak disembunyikan akan mengakibatkan ketimpangan global apabila kekayaan tidak didistribusikan secara merata.

Sebab itu, selayaknya organisasi-organisasi Internasional, seperti



■ Sri Mulyani

PBB, IMF dan G20 menyuarakan sistem pajak Internasional yang kuat, adil dan berintegritas. Selain itu, berbagai negara harus terlibat dalam mengatasi tantangan ini. Sebab, masih banyak para pelaku bisnis yang tidak mematuhi peraturan pajak dan menyembunyikan kekayaannya. Hal ini dalam rangka memenuhi tujuan global, yaitu memerangi kemiskinan dan mendistribusikan kemakmuran Bersama.

Meski banyak orang yang tidak suka membayar pajak, namun membangun masyarakat yang adil melalui sistem pajak adalah sebuah keharusan. Kaum elit harus mematuhi berbagai peraturan yang ada sehingga dana hasil pajak dapat secara efisien digunakan untuk masyarakat miskin. Hal ini juga termasuk memerangi penimbunan harta kekayaan.

“Kita mungkin tidak bisa membuat orang dan perusahaan menikmati membayar pajak. Namun, kita harus menciptakan sistem yang membuat orang dan perusahaan jauh lebih sulit menyembunyikan kekayaan dan menghindari beban pajaknya. Ini adalah bagian penting dari perjuangan melawan kemiskinan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah kesempatan di Jakarta. ■ Aldi

LORD DI PUSARAN TAMBANG EMAS



Dalam film-film yang bercerita tentang dunia hitam para mafia di Italia atau Inggris, panggilan lord kerap disebut pada sosok tertentu yang yang memiliki kuasa atau kendali atas pihak lain. Namun, belakangan, panggilan ini menjadi perbincangan nasional karena sosok Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut-sebut berperan besar dalam pengaturan tambang emas di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Lord Luhut, begitulah kira-kira, nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, belakangan disebut-sebut publik. Dipanggil Lord karena sosoknya yang berada di balik sejumlah *deal* investasi negeri ini dengan sejumlah negara asing, seperti dengan Tiongkok, Amerika Serikat (AS), Jepang dan sejumlah negara lainnya.

Yang paling akhir dan fenomenal, yaitu keterlibatannya dalam permainan tambang emas di Papua. Melalui konten *YouTube* berjudul *Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!*, Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengutip laporan WALHI Papua yang menyebut ada indikasi kepentingan pengusaha tambang dalam riset berjudul “*Ekonomi-Politik Penempatan*

Militer, Studi Kasus Intan Jaya di Papua.”

Laporan tersebut mengungkap pengerahan kekuatan militer dan dugaan indikasi relasinya dengan konsensi perusahaan tambang secara ilegal. Riset Walhi Papua menyebut, *West Wist Mining* dalam laporan tahunannya menyebut perusahaan Derewo River Gold Project berafiliasi dengan Luhut.

Menko Marves itu disebut dalam laporan karena jejak perusahaan PT Toba Sejahtera Group terhubung dengan Tobacom Del Mandiri & Tambang Raya Sejahtera. Temuan inilah yang dibahas Haris bersama Fatia di konten *YouTube*, dan berujung pada somasi untuk keduanya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) dan Kuasa Hukum Fatia Asfinawati menyesali tindakan Luhut. “Somasi ini terbalik, seharusnya masyarakat yang mengawasi dan mensomasi pejabat publik, bukan sebaliknya. Sesungguhnya esensi demokrasi adalah pengawasan oleh publik, kritik oleh publik, bukan justru membungkam kritik dan pengawasan oleh publik.” tutur Asfinawati.

Dalam kanal *YouTube* tersebut, Fatia mengatakan operasi militer di Intan Jaya diduga agar masyarakat mengungsi dari tempat tinggalnya dan memudahkan perizinan pertambangan. Di blok Wabu, Intan Jaya, masyarakat sudah pindah dan mengungsi karena operasi militer.

Fatia melanjutkan, operasi militer

adalah salah satu kamuflase dari bisnis pertambangan yang dikuasai purnawirawan. Adanya militerisme di Papua yang diklaim untuk keamanan bahkan terorisme nyatanya untuk memperlancar pertambangan emas.

Haris Azhar sendiri telah membalas somasi kedua dari Luhut dan justru mengundang Menko Marves tersebut mengklarifikasi dan hak membantah pada kanal *YouTube*-nya. Menurutny, pembahasan dalam kanalnya adalah hasil riset LSM dan NGO kredibel yang jika ada misinformasi, maka hal tersebut bisa diklarifikasi, bukan sebaliknya malah dikriminalisasi.

Purnawirawan “Bermain” Tambang Emas

Ada empat perusahaan yang memiliki konsensi di Intan Jaya, yaitu PT. Aneka Tambang, PT Madinah Qurrota'ain, PT. Nusapati Patria dan PT Kotabara Miratama. Induk PT Madinah Qurrota'ain yakni West Wist Mining yang menyerahkan 30% proyek di Sungai Derewo kepada Tobacom Del Mandiri seperti tertera dalam *annual report* West Wist Mining. Setahun kemudian, West Wist Mining merilis peralihan saham tersebut yang akan diberikan kepada PT. Tambang Raya Sejahtera.

Saat membedah dokumen PT Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera, dua perusahaan ini dimiliki oleh PT Toba Sejahtera. Dari dokumen ini terlihat hampir 99% kepemilikan saham PT Toba Sejahtera dimiliki Luhut. Sementara itu, perubahan kepemilikan saham di PT Madinah Qurrota'ain baru terjadi pada 2018.



Asfinawati



■ Luhut Binsar Panjaitan

Menariknya, perubahan saham di PT Madinah Qurrota'ain ternyata tidak memasukkan nama Tobacom Del Mandiri. Justru ada nama perusahaan baru yaitu PT Baytech Binar Nusantara. Namun, hal ini dibantah pengacara Luhut Juniver Girsang, di acara *Mata Najwa* yang berjudul *Fakta di Balik Akta Sejumlah Perusahaan Tambang di Papua*. Dia menyebut tidak ada kaitan sama sekali antara PT Baytech Binar Nusantara dengan Luhut.

Hingga saat ini, perusahaan ini memiliki 30% saham di PT Madinah Qurrota'ain dan 99% saham dimiliki Paulus Prananto, seorang purnawirawan TNI. Sosok ini juga muncul di dua perusahaan Luhut yakni di PT Tambang Raya Sejahtera dan PT Tobacom Del Mandiri. Paulus menjabat sebagai direktur di kedua PT tersebut dan bekerja di PT Toba Sejahtera, tetapi hal ini juga dibantah oleh Juniver. “Paulus Prananto tidak ada urusan dengan Luhut,” kata

Juniver.

Menurut Juniver, di acara yang disiarkan awal Oktober 2021 itu, Tobacco Del Mandiri menawarkan pada Toba Sejahtera untuk eksplorasi Intan Jaya, namun tidak dilanjutkan karena akan mengganggu lingkungan kawasan hutan. Juniver menekankan, Luhut tidak ada kaitan dengan West Wist Mining. Hal itu terbukti hingga saat ini tidak adanya eksplorasi terhadap lingkungan tersebut. Juniver Girsang meminta agar dikaji ulang laporan dari Walhi dengan data yang lebih relevan.

Sementara itu, menurut Fatia, selain nama Luhut dan Paulus Prananto, ada beberapa purnawirawan dan elit Kopassus yang juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang memiliki konsensi atas Intan Jaya. Fatia menyebut nama antara lain Komjen Bambang Sunarwibowo, Muhamamd Munir dan Agus Suryabakti. Persoalannya, semua purnawirawan yang duduk dalam komisaris tersebut adalah tim pemenang Jokowi. ■

Ika/Nafik

DUA TAHUN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – MA'RUF AMIN

GEBRAKAN KEMENDIKBUDRISTEK WUJUDKAN SDM UNGGUL

Meski pandemi belum juga usai, semangat untuk terus bergerak mempercepat transformasi pendidikan serta pengarusutamaan pemajuan kebudayaan tetap tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melanjutkan implementasi kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya bangkit dari situasi pandemi.

Sejumlah program prioritas dilaksanakan dan sebagian besar telah mencapai target di 2020. Pada 2021, seluruh program prioritas tersebut berada pada jalur yang tepat sehingga realisasi program mendekati target yang ditetapkan meski terkendala pandemi. Program prioritas tersebut terbalut dalam kebijakan Merdeka Belajar yang telah hadir sejak 2019 dan terus berlanjut hingga kini pada 2021.

Setelah meluncurkan lima kebijakan Merdeka Belajar dalam kurun waktu Desember 2019 sampai dengan Juli 2020, selama kurun waktu setahun terakhir, yakni Oktober 2020 sampai Oktober 2021, setidaknya ada delapan kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem

Anwar Makarim, yaitu Merdeka Belajar Episode 6 hingga Episode 13.

Merdeka Belajar Episode 6 menekankan pada transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi; Episode 7: Sekolah Penggerak; Episode 8: SMK Pusat Keunggulan; Episode 9: Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka; Episode 10: perluasan program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Episode 11: Kampus Merdeka Vokasi, Episode 12: Sekolah Aman Berbelanja bersama SipLah, dan Episode 13: Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana.

Selain itu, Kemendikbudristek juga meneruskan berbagai bantuan penanganan pandemi yang telah digulirkan sejak awal wabah Covid-19 melanda, seperti bantuan kuota data internet untuk seluruh pendidik dan pelajar. Sebanyak 26,6 juta penerima

bantuan kuota data internet dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi diringankan beban ekonominya dan ditunjang pembelajarannya, baik yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, maupun yang masih belajar jarak jauh.

Berbagai Kebijakan, Satu Tujuan

Secara garis besar, sejumlah kebijakan dan program Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan perbaikan pada empat hal, yakni 1) Infrastruktur dan teknologi; 2) Kebijakan, prosedur, dan pendanaan; 3) Kepemimpinan, masyarakat dan budaya; dan 4) Kurikulum, pedagogi, dan asesmen.



Kebijakan yang sejalan dengan empat lini perbaikan tersebut terbalut dalam 12 program prioritas Kemendikbudristek, yaitu transformasi pembiayaan pendidikan; digitalisasi pendidikan dan bantuan kuota internet; penguatan karakter, peningkatan prestasi, dan manajemen talenta; penguatan pendidikan vokasi; dan kampus merdeka.

Selain itu ada pula program prioritas pemajuan kebudayaan; pengembangan bahasa dan sastra; kurikulum, asesmen, dan perbukuan; transformasi dan peningkatan kapasitas sekolah; transformasi dan peningkatan kapasitas guru; program respons pandemi Covid-19; serta program afirmasi Papua dan Papua Barat. Di samping itu, Kemendikbudristek juga melaksanakan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK nonfisik bidang

pendidikan.

Seluruh kebijakan transformatif tersebut bertujuan untuk membantu siswa/mahasiswa, guru, dan satuan pendidikan meningkatkan akses dan mutu pendidikan, memperkuat pendidikan karakter pada setiap jenjang pendidikan, serta mengembangkan prestasi peserta didik.

Keadilan yang Tidak Seragam

Pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2020, Presiden RI menekankan bahwa Indonesia adalah negara besar sehingga kebutuhannya pasti beragam. Menanggapi hal tersebut, Mendikbudristek mengingatkan apa yang pernah disampaikan Kepala Negara kepada dirinya, “keseragaman belum tentu keadilan”.

Karenanya Kemendikbudristek

terus melakukan berbagai terobosan Merdeka Belajar dan afirmasi kebijakan agar tujuan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar tercapai. Di tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kemendikbudristek mendobrak dengan penyempurnaan program-program yang telah baik terlaksana, menjadi lebih berkeadilan dan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat.

Kebijakan dana BOS tahun 2021 adalah salah satu bentuk dari dobrakan tersebut. Dana BOS tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik daerah masing-masing, penggunaan dana BOS tetap fleksibel--termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan PTM terbatas, serta pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring

dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Mulai tahun ini pula, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antardaerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (**IKK**) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. Contohnya, SMA 1 Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Papua yang besaran alokasi dana BOS 2020 sebesar Rp93.000.000, tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 131% menjadi Rp215.140.000.

Selain itu, tahun ini kebijakan KIP Kuliah juga dilakukan penyesuaian. Sebelumnya, besaran uang kuliah per mahasiswa ditetapkan sama, yaitu sebesar Rp2,4 juta di manapun mereka menimba ilmu. Kini, Kemendikbudristek menghadirkan KIP Kuliah Merdeka yang mendorong anak-anak dengan kondisi ekonomi kurang dan tidak mampu untuk tetap berani meraih cita-cita setinggi-tingginya dan mendapatkan pengalaman di luar daerahnya tanpa memberatkan ekonomi keluarga.

Kemendikbudristek membagi batas maksimal uang kuliah berdasarkan akreditasi program studi (prodi). Pada prodi akreditasi C, maksimal bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp2,4 juta per semester. Calon mahasiswa yang berhasil ke prodi dengan akreditasi B memperoleh batas maksimal bantuan Rp4 juta per semester. Sementara itu, bagi calon mahasiswa yang berhasil mendapatkan prodi dengan akreditasi A, Kemendikbudristek memberikan biaya pendidikan sampai batas maksimal Rp12 juta per semester.

Perubahan lainnya pada skema KIP Kuliah Merdeka adalah pada biaya hidup yang majemuk berdasarkan indeks kemahalan. Jika pada tahun 2020 biaya hidup yang diberikan

adalah Rp700.000, pada tahun ini biaya hidup yang diberikan minimal dari angka Rp800.000 sampai dengan Rp1.400.000, berdasarkan lokasi perguruan tinggi.

Pandemi Bukan Penghalang Transformasi

Meski pandemi belum usai, transformasi diberbagai lini bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi terus digulirkan untuk mencapai SDM unggul, Indonesia maju. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi tahap pertama dan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Seleksi bagi guru honorer akan terus bergulir sehingga akan lebih banyak lagi guru honorer yang akan diangkat menjadi ASN PPPK.

Seleksi ini merupakan bukti komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan mengangkat derajat guru sebagai profesi mulia dan terhormat. Dengan status sebagai ASN PPPK, guru juga akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengikuti program peningkatan kompetensi sehingga akan berimbas pada peningkatan kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar-pelajar Indonesia.

Selain itu, sebagai tindak lanjut Merdeka Belajar Episode Satu yang mengganti Ujian Nasional, Asesmen Nasional (AN) dapat dijalankan dengan baik di berbagai sekolah di Indonesia dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. AN akan menjadi krusial bagi Indonesia untuk menetapkan kebijakan-kebijakan bidang pendidikan di masa depan secara lebih tepat guna dan tepat sasaran..

Ada tiga manfaat dari AN. Pertama, sebagai evaluasi sistem yang tidak

memiliki konsekuensi pada murid dan guru peserta AN. Kedua, pemetaan dan umpan balik berbasis data bagi satuan dan dinas pendidikan sehingga dapat menghadirkan kebijakan dan anggaran yang tepat manfaat. Ketiga, untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan.

Lebih lanjut di bidang kebudayaan, untuk pertama kalinya di Indonesia, Kemendikbudristek menghadirkan kanal media khusus budaya yang dinamakan Indonesiana. Kanal media ini bertujuan untuk mewadahi, mengintegrasikan, serta mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat Indonesia. Kanal Indonesiana diluncurkan sebagai Merdeka Belajar Episode ke-13, merupakan salah satu upaya mewujudkan visi pemajuan kebudayaan, yakni Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan.

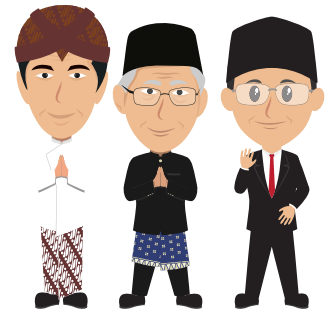
Kehadiran kanal Indonesiana sebagai upaya pemajuan kebudayaan yang partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan bekerja tidak dengan menggunakan cara-cara lama. Kanal Indonesiana bermitra dengan masyarakat, serta para pelaku dan komunitas seni budaya, karena partisipasi masyarakat adalah kunci dalam menciptakan kanal budaya yang inklusif dan relevan, serta menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas kebudayaan Indonesia yang luar biasa kaya.

Meski menghadapi kondisi pandemi Covid-19, program-program prioritas lainnya tetap dilaksanakan agar percepatan transformasi pendidikan dan kebudayaan di Indonesia dapat cepat tercapai. Dengan demikian, cita-cita bangsa ini memiliki SDM unggul yang berdaya saing global dapat tercapai. (*)



8 Episode Merdeka Belajar

Oktober 2020 s.d. Oktober 2021



Episode 6

Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi

- Insentif berdasarkan capaian delapan Indeks Kinerja Utama (untuk PTN)
- *Matching fund* untuk kerja sama dengan mitra (untuk PTN dan PTS)
- *Competitive fund program* kompetisi kampus merdeka (untuk PTN dan PTS)

Episode 7

Program Sekolah Penggerak

Mengembangkan sekolah-sekolah katalis yang diawali dengan pemberdayaan kepala sekolah dan guru menjadi SDM unggul melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistik dalam hal pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, sampai pendampingan selama tiga tahun ajaran bagi sekolah negeri maupun swasta.

Episode 8

SMK Pusat Keunggulan

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi dengan dunia kerja dan menjadi rujukan bagi SMK lainnya, melalui:

- Keterlibatan industri dalam proses pembelajaran
- Pelatihan guru-guru kejuruan yang sesuai standar industri
- Pelatihan manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah
- Fasilitasi pembelajaran berbasis industri
- Terlibatnya Perguruan Tinggi sebagai pendamping
- SMK agar terwujud *link and match* yang semakin optimal

Episode 9

KIP Kuliah Merdeka

- Memberikan kemerdekaan bagi murid dari keluarga miskin dan rentan agar dapat berkuliah pada program studi unggulan di Perguruan Tinggi terbaik
- Menaikkan alokasi biaya pendidikan yang dibayarkan kepada Perguruan Tinggi akan memberikan peluang kepada seluruh mahasiswa untuk memilih apapun program studi yang diminati dan sesuai dengan prestasi akademiknya
- Meningkatkan bantuan biaya hidup untuk mendorong mobilitas sosial siswa penerima KIP Kuliah Merdeka sehingga para siswa akan lebih percaya diri dan tidak ragu untuk mencari Perguruan Tinggi terbaik di kota-kota besar

Episode 10

Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

- Program beasiswa Kampus Merdeka
- Beasiswa bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan
- Beasiswa program vokasi dan program prestasi
- Beasiswa kebudayaan

Episode 11

Kampus Merdeka Vokasi

- Dana kompetitif Kampus Vokasi (*competitive fund vokasi*)
Terdapat program SMK-D2 Jalur Cepat berbasis kerja sama dunia usaha-dunia industri untuk meningkatkan SDM berkualifikasi yang terampil dan unggul dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, terdapat program Peningkatan Prodi D3 menjadi Sarjana Terapan (D4) yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah program studi D4 yang fokus kepada soft skills dan karakter siap kerja.
- Dana padanan Kampus Vokasi (*matching fund vokasi*).
Terdapat tiga program yaitu: 1) Penguatan Pusat Unggulan Teknologi (PUT), 2) Hilirisasi Produk Purwarupa/ Teknologi, dan 3) Startup Produk Inovasi Perguruan Tinggi.

Episode 12

Sekolah Aman Berbelanja melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah)

- Pendokumentasian transaksi secara elektronik yang transparan dan akuntabel
- Efisiensi anggaran dengan harga yang kompetitif dan opsi yang beragam
- Partisipasi pelaku UMKM di berbagai daerah

Episode 13

Merdeka Berbudaya melalui Kanal Indonesiana

Kanal Indonesiana bertujuan untuk mewadahi, mengintegrasikan, serta mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat Indonesia.

Kanal Indonesiana dapat diakses melalui laman indonesiana.tv, siaran televisi jaringan Indihome, dan media sosial.

MERDEKA BELAJAR



BERBAGAI pernyataan positif dari para pemangku kepentingan terekam saat menanggapi kebijakan Merdeka Belajar. Berikut ini adalah sebagian dari tanggapan mereka mengenai kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan selama kurun waktu Oktober 2020 hingga Oktober 2021, yaitu Merdeka Belajar Episode 6 s.d. Episode 13.



Merdeka Belajar Episode 6: Transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi

“Dorongan Kemendikbud memberi fleksibilitas pada perguruan tinggi sangat relevan dan sejalan dengan upaya ITB. Mas Menteri sudah menyampaikan bahwa tiap kampus punya karakter dan keunggulan masing-masing, sehingga tiap perguruan tinggi merasa terlibat dan punya rasa memiliki karena kita saling mengisi dan turut berperan.”

Reini Wirahadikusumah,
Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB)

“Kampus Merdeka membuat mahasiswa punya harapan peluang lebih besar untuk magang di perusahaan-perusahaan yang baik dan memberikan pengalaman relevan di lapangan. Setelah lulus kami memiliki bekal untuk lebih kritis menyikapi masalah dan berinovasi dalam memecahkan masalah di tengah masyarakat.”

Henry Timothy, *Mahasiswa Universitas Airlangga*

Merdeka Belajar Episode 7: Sekolah Penggerak

“DPR RI mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait program Sekolah Penggerak. Program ini adalah bagian dari Peta Jalan Pendidikan Merdeka Belajar yang sudah memasuki episode ke-7.”

Syaiful Huda, *Ketua Komisi X DPR RI*

Merdeka Belajar Episode 8: SMK Pusat Keunggulan

“LP Ma'arif NU menyambut baik peluncuran program Pusat Keunggulan dari Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Semoga program ini berjalan dan berhasil dengan baik, sesuai dengan tujuannya.”

Z. Arifin Junaidi, *Ketua LP Ma'arif NU*

“Kami dari KADIN senantiasa selalu mendukung langkah-langkah Kemendikbud di bidang vokasi, untuk meningkatkan SDM kita ke depannya. Insyaallah kita bisa menghasilkan tenaga kerja yang unggul, terampil, dan kompeten sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dan menumbuhkan perekonomian.”

Rosan Perkasa Roeslani,
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia

Merdeka Belajar Episode 9: KIP Kuliah Merdeka

“Kami mendukung program ini dengan optimal, terbukti dengan serapan kuota KIP Kuliah untuk Unsyiah mencapai 100 persen dan pembayaran biaya hidup dilakukan tepat waktu. Para penerima KIP Kuliah mampu menyelesaikan masa kuliahnya dalam waktu 8 hingga 9 semester dengan rata-rata IPK 3,2.”

Samsul Rizal, *Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)*

“Saya senang dapat menerima KIP Kuliah Merdeka karena sangat membantu meringankan beban ekonomi orang tua saya. Saya juga lebih berani memilih fakultas yang saya minati dan tidak perlu khawatir memikirkan biaya pendidikannya.”

Zahra Della Sylva, *Siswa Penerima KIP Kuliah*

Merdeka Belajar Episode 10: Perluasan program Beasiswa LPDP;

“Melalui LPDP saya mendapat kesempatan menggapai cita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Amerika Serikat. Awalnya saya tidak menduga bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri, mengingat berlatar belakang keluarga tidak mampu secara ekonomi dan saya berasal dari daerah 3T di Provinsi Papua yang memiliki banyak keterbatasan.”

Paskalis Kaipman, *Alumni Program LPDP 2017*

Merdeka Belajar Episode 11: Kampus Merdeka Vokasi

“Saya menyambut baik skema pendanaan Dana Kompetitif dan Dana Panduan yang ditawarkan Kampus Merdeka Vokasi. Ini akan mempercepat transformasi pendidikan tinggi vokasi berstandar industri. Dengan Kampus Merdeka Vokasi tentu mutu pendidikan anak-anak kita terjaga dan kampus bermanfaat bagi masyarakat.”

Agustina Wilujeng Prameswari, *Wakil Ketua Komisi X DPR RI*

Merdeka Belajar Episode 12: Sekolah aman berbelanja Bersama SipLah

“Partisipasi aktif industri dalam negeri melalui aplikasi SIPLah diharapkan dapat menjadi peluang untuk mendapatkan kepastian pemasaran produknya secara nasional terutama di era digital dan masa pandemi Covid-19 saat ini, serta memperluas pilihan komoditas barang/jasa produksi dalam negeri sesuai kebutuhan satuan pendidikan dalam ekosistem pasar logistik pendidikan.”

Arus Gunawan, *Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian*

Merdeka Belajar Episode 13: Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesia

“Saya yakin suguhan informasi dari Kanal Indonesiana akan menarik bagi generasi saya. Saya pikir, jika sebuah tradisi musik bisa diekspos dan disajikan secara mudah di platform televisi, maka akan memberikan kemudahan untuk melihat berbagai macam budaya Indonesia yang sangat indah dan magis.”

Vira Talisa, *Penyanyi*

“Kerinduan seniman Indonesia, termasuk saya, untuk berekspresi, akan terwujud dalam kanal Indonesiana ini.”

Didik Ninik Thowok, *Penggiat Budaya dan Maestro Tari*

Seleksi ASN PPPK tahun 2021

“Ini kesempatan bagus dari pemerintah, dan saya mengambil peluang dengan belajar sungguh-sungguh. Saya senang sekali bisa lulus seleksi ASN PPPK.”

Siti Ratma, *Guru SMP Negeri 5 Lingsar Lombok Barat*

“Terima kasih pada pemerintah yang sudah membuat regulasi fantastis, yaitu Seleksi PPPK. Ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan para guru.”

Ade Taufik Kurahman,
Guru SMA Negeri 1 Pamijahan, Kabupaten Bogor

Asesmen Nasional

“Saya yakin, asesmen nasional akan mampu menjawab persoalan pendidikan yang selama ini kita rasakan, sehingga murid benar-benar dalam posisi merdeka belajar. Pendidik dan satuan pendidikan menghasilkan output murid yang memahami keberagaman dan mampu bersaing secara global sebagai kecakapan hidup abad 21.”

Muhammad Haris,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng

“Asesmen nasional adalah harapan. Mari kita bahu-membahu untuk bersama-sama menggenggam harapan ini dan kemudian melangkah bersama sehingga pendidikan nasional sesuai harapan kita menjadi lebih baik lagi.”

Evi Ghozaly, *Konsultan Pendidikan*

Adapun kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan selama kurun waktu Desember 2019 hingga Juli 2020, yaitu Merdeka Belajar Episode 1 s.d. Episode 5.

Merdeka Belajar Episode 1:	Penggantian Ujian Nasional, Penghapusan USBN, Penyederhanaan RPP, Zonasi PPDB
Merdeka Belajar Episode 2:	Kampus Merdeka
Merdeka Belajar Episode 3:	Perubahan Mekanisme BOS
Merdeka Belajar Episode 4:	Organisasi Penggerak
Merdeka Belajar Episode 5:	Guru Penggerak



TANDA BELUM AKIL-BALIG KLAIM GUS YAQUT

Entah apa yang ada di benak Menteri Agama (Menag) Yaquut Cholil Qoumas selain hasrat kuasa. Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba dia mengutarakan pernyataan kontroversial mengenai klaim kepemilikan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai hadiah kepada Nahdlatul Ulama (NU). Jelas saja, ungkapan tersebut langsung mendapatkan kritik yang tajam dari beragam pihak. Ada yang menyebutnya belum akil balig, juga ada yang menyebutnya sebagai menteri yang sering salah memberikan pernyataan.

Dalam webinar internasional yang ditayangkan di salah satu channel *Youtube*, menurut Yaquut, Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU. “Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang

ada di Kementerian Agama,” jelas Yaquut, yang kemudian mengundang kritik dari berbagai tokoh.

Dia melanjutkan, NU itu banyak jamaahnya dan secara fisik badannya besar. Orang yang besar itu cenderung melindungi yang lemah, melindungi yang kecil, dan itu sifat NU. Jadi, kalau sekarang Kementerian Agama menjadi

kementerian semua agama, itu bukan menghilangkan ke-NU-annya, tapi justru menegaskan ke-NU-annya.

Yaqut menambahkan, NU itu terkenal paling toleran dan moderat. “Saya kira itu menjadi *background* cara-cara berpikir kami di Kementerian Agama yang *insyaallah* hampir seragam, meskipun masih ada satu dua ya bisa karena kita mengelola organisasi yang besar,” katanya.

Pernyataan di atas sangat jelas bahwa apa yang dikatakan Yaqut tidak mencerminkan sebagai seorang negarawan. Secara tidak langsung telah mendistorsi nilai-nilai kebangsaan dan menunjukkan primordialisme terhadap kelompoknya. Tentu saja, sikap yang demikian itu tidak baik untuk kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keragaman.

Hal ini kemudian mengundang reaksi berbagai tokoh. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Indonesia, termasuk lembaga-lembaga negara merupakan milik semua, bukan dikuasai atau hadiah bagi satu kelompok saja.

Dia menegaskan, semisal ada elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya, maka ini adalah narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan.

Indonesia sudah 76 tahun merdeka, mestinya segenap warga dan elite negeri semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara.

“Ketika ada yang mengatakan demikian, maka sesungguhnya ada elit negeri yang belum dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Masih ada saja yang belum beranjak *“akil-balig”*. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya,” ungkap Haedar.

Inilah ironi keindonesiaan, lanjut Haedar. Menurutnya, suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita Aku Pancasila, Aku Indonesia, Aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ironi sebagai bukti, Indonesia ternyata belum menjadi milik semua.

Ia menjelaskan, Indonesia lahir dan

hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haedar, dengan mengutip pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa pendirian negara Indonesia adalah untuk semua.

“Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua,” kata dia mengutip pidato Presiden pertama Republik Indonesia itu.

Menurutnya, ketika ada warga atau elite bangsa atau golongan yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompoknya, maka telah keluar dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.

“Sama halnya bila muncul asumsi bahwa Negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironi seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara,” kata dia.

Maka dari itu, ia mengajak semua orang untuk memunculkan jiwa kenegarawanan dalam berbangsa



“Ketika ada warga atau elite bangsa atau golongan yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompoknya, maka telah keluar dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.”

Haedar Nashir
Ketua Umum PP Muhammadiyah

dan bernegara dengan meruntuhkan segala kesombongan diri di atas otoritas Sang Pencipta.

“Sebaliknya, mesti dieliminasi segala wujud nafsu duniawi yang melampaui batas. Nabi mengingatkan, jika manusia diberi satu gunung emas, dia akan meminta gunung yang kedua, setelah diberi yang kedua, dia minta gunung emas ketiga. Hanya kematian yang memutus nafsu keserakahan itu,” katanya.

Pernyataan senada juga datang dari Anwar Abbas. Dia mengatakan, ini merupakan cara berpikir yang keliru. “Kalau kita kaitkan dengan masalah kebangsaan dan pengelolaan negara, tentu jelas sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat,” kata Anwar Abbas.

Anwar Abbas mengaku heran dengan apa yang disampaikan oleh Yaqut. Pernyataan tersebut sangat disayangkan dan seakan tidak menghargai kelompok masyarakat lainnya.

“Pernyataan ini tentu sangat-sangat kita sayangkan karena tidak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lainnya,” kata Anwar dalam keterangannya, Minggu (24/10).



Anwar Abbas

Menanggapi pernyataan kontroversial tersebut politikus Gerindra Fadli Zon menyatakan, Yaqut Cholil Qoumas acap kali salah memosisikan diri atau ucapannya sendiri sebagai Menteri Agama.

“Menag ini sering salah menempatkan diri atau salah pernyataan,” kata Fadli Zon seperti dikutip dari akun *Twitter* @fadlizon pada Minggu (24/10).

Hemat Fadli Zon, sebagai bapak untuk semua umat beragama di Tanah Air, Gus Yaqut perlu segera memverifikasi pernyataannya. Selain Gus Yaqut, Fadli Zon menuntut orang nomor satu di Indonesia, Jokowi untuk memberi klarifikasi terkait klaim sang Menag.

“Klaim ini perlu diklarifikasi termasuk oleh Pak @jokowi. Benarkah kementerian agama ini hadiah khusus utk NU bukan untuk umat Islam secara keseluruhan atau umat beragama lainnya?,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa Kementerian Agama bukanlah kado dari negara bagi Nahdlatul Ulama atau untuk umat Islam semata, tapi hadiah bagi semua agama.

Menurut Helmy, NU memang punya peran besar dalam menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Namun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus.

Bahkan, peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.

“Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk

menguasai ataupun memiliki semacam ‘privilege’ dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan, karena NU adalah *jamiyyah diniyah ijtimaiyyah* (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan),” kata dia.

Adapun Yaqut dalam klarifikasinya menyatakan, hal itu disampaikan di forum internal untuk memantik semangat para santri dan pondok pesantren. Menag memastikan bahwa Kemenag tidak hanya untuk NU. Terbukti, dari Kemenag yang mengafirmasi kepada semua agama.

Meskipun demikian, Yaqut adalah pejabat negara yang harus menjaga perkataannya. Apa yang telah diucapkan telah menjadi konsumsi seluruh masyarakat Indonesia.

Dari kasus di atas sudah semestinya hal ini dijadikan refleksi Bersama, khususnya para pejabat negara yang saat ini tengah menduduki kursi-kursi jabatan. Bahwa pikiran, pernyataan dan tindakan haruslah melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal-hal yang mencerminkan sifat dan sikap perpecahan sudah selayaknya untuk dihindari bersama. ■

(Aldi, dari berbagai sumber)



Helmy Faishal Zaini



ASSET MAJALAH CARAPANDANG

ASAL USUL DAN MASA DEPAN KEMENTERIAN AGAMA

Dalam acara Webinar Santri Membangun Negeri, yang diadakan Rabithah Ma'ahid Islamiyah dan PBNU, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, berpendapat, “Kemenag itu hadiah Negara untuk NU, bukan untuk Umat Islam”. Komentar singkat itu, menjawab ketidaksetujuan stafnya kepada idenya mengganti moto “Ikhlas Beramal”.

Menag Yaqut juga menekankan peran juru damai dari NU ketika terjadi pro kontra pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Karena ada peran juru damai NU itu, maka kementerian agama berdiri. Komentar ini pun ditanggapi berbagai pihak, termasuk pimpinan Muhammadiyah, di kalangan pimpinan PBNU sendiri, dan berbagai elemen masyarakat.

Kebetulan saya meneliti dan menulis entry ensiklopedia tentang Kementerian Agama, dan saya produk kementerian ini juga. Nimbrung sedikit saja, karena sejarah dan perkembangan kemenag memang kompleks dan dinamis.

Latar belakang historisnya, sebuah lembaga yang mengurus urusan agama secara khusus dimulai dari zaman kerajaan-kerajaan Islam pra-kolonial: Di Aceh ada Syaikh al-Islam, di Sulawesi ada, Parewa Sara, sejalan dengan Parewa Adat. Pemerintah Belanda mendirikan Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Pribumi). Pemerintah kolonial Jepang

menggantinya menjadi Shumubu.

Para pegawai Kementerian Agama yang didirikan setelah kemerdekaan, sebagiannya dari pejabat di masa kolonial Belanda dan Jepang itu. Singkatnya, kementerian agama juga sebagian tugas utamanya adalah warisan kolonial (dan dalam beberapa aspek juga pra-kolonial kerajaan-kerajaan Islam).

Perdebatan Perlu Tidaknya Pendirian Kemenag

Soekarno setuju pandangan sebagian tokoh Muslim ketika itu yang menginginkan kementerian agama. Mohammad Hatta, setuju penghapusan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Suara-suara ingin mendirikan kementerian agama datang dari berbagai unsur: Muhammadiyah, NU, Jong Islamiten Bond, nasionalis, dan lain-lain.

Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin mengusulkan “kementerian Islamiyah”, tapi tidak mendapat dukungan luas. Dalam sidang PPKI, usul kementerian agama tidak disepakati, oleh kalangan nasionalis dan dari sebagian kalangan Islam sendiri. Usulan kementerian agama disetujui oleh Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang datang dari Karesidenan Banyumas.

Di masa Kabinet presidensial, tokoh NU Wahid Hasyim menjabat “Menteri

Negara” yang juga menangani urusan umat Islam, selama beberapa bulan (19 Agustus/2 September 1945-14 November 1945). Namun “kementerian agama” waktu itu belum didirikan.

Pada sidang pleno 25-28 November 1945 di UI Salemba, wakil-wakil KNIP Karesidenan Banyumas mengusulkan, “Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambalutkan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri” (Departemen Penerangan 1965).

Presiden Soekarno dan Wapres Mohamad Hatta baru mengeluarkan Ketetapan pada 3 Januari 1946, dan menjadi hari lahir Kemenag setelah itu. Soekarno dan Hatta mengangkat Mohammad Rasjidi sebagai Menteri Agama seiring dengan surat ketetapan itu. Rasjidi, ketika itu lulusan Kairo dan Sorbonne, dari Masyumi-Muhammadiyah.

Rasjidi menganggap dirinya lahir dari “Islam Abangan”, bukan santri. Ia menulis, “aku seorang Muslim moderen. Walaupun aku tidak pernah mengunjungi sekolah Belanda, tetapi paham membaca buku-buku dalam bahasa Belanda. Di samping itu aku lancar berbahasa Inggris dan Prancis” (1968).

Rasjidi belajar di sekolah



Muhamad Ali
Associate Professor & Director Middle
East & Islamic Studies
University of California, Riverside

Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lalu ke Kairo, juga menjadi diplomat. Setelah diminta pulang dan diangkat Soekarno-Hatta, Menag Rasjidi harus menanggapi berbagai kritik terhadap didirikannya kementerian agama. Menurut Rasjidi, kemenag didirikan untuk mewujudkan pasal ketuhanan yang maha esa dan negara menjamin kebebasan beragama seperti dalam UUD 1945.

Menteri Agama selanjutnya, Raden Fathurrahman Kafrawi lulusan Mekah, Kairo, dan Leiden, dari Masyumi-NU, dan memfokuskan kebijakannya pada pendidikan agama di sekolah umum, madrasah dan pesantren. Menteri-menteri agama selanjutnya berasal dari NU, termasuk Wahid Hasyim (yang sebelumnya Menteri Negara, menjadi Menteri Agama 20 Desember 1949-6 September 1950, lalu 1950-1952) mewakili Masyumi-NU, dan kemudian beberapa Menag dari Muhammadiyah (termasuk Fakhri Usman 1952-1953), beberapa dari partai, bukan dari kalangan NU atau Muhammadiyah, dan perguruan tinggi. A. Mukti Ali, lulusan McGill Kanada, dianggap mewakili unsur akademis dan politik Golkar, berperan dalam pengajaran perbandingan agama.

Begitu juga Munawir Sjadzali, lulusan Exeter dan Georgetown University. Tarmizi Taher, seorang dokter, tidak terkait langsung NU atau Muhammadiyah, tapi dianggap cukup berhasil membangun triologi kerukunan: intra-umat, antar-umat,

dan antara umat dan Negara. A. Malik Fadjar, dari kalangan perguruan tinggi dan Muhammadiyah. Setelah Malik Fadjar, menag berasal dari kalangan partai seperti PPP dan PKB dan ormas NU.

Dalam perjalanannya, melalui Depag/Kemenag, Negara makin terlibat dalam berbagai urusan agama. Urusan-urusan yang sebelumnya dibawah kementerian dalam negeri, pendidikan dan kebudayaan, dan kehakiman. Dirjen agama-agama lain pun dibentuk, termasuk Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Sejak awal pendirian dan sepak terjang kementerian dan birokrat agama tetap menimbulkan pro dan kontra, termasuk kasus-kasus korupsi, meskipun secara institusional, terbukti “survive” dan “berkembang” hingga sekarang.

Di tahun 1960-an, Clifford Geertz berpendapat, “tujuan dan maksud pendirian Kementerian Agama merupakan urusan santri dari atas sampai bawah”, Sarjana B.J. Boland berpendapat, “kementerian agama merupakan kompromi politik antara kalangan yang ingin mendirikan Negara Islam dan kalangan yang ingin mendirikan negara sekuler.”

Kajian-kajian akademis menyebut kementerian agama sebagai contoh negara Indonesia semi-sekuler, semi-agama. Almarhum Gus Dur pernah berniat membubarkan Departemen Agama karena “Depag sudah menjadi seperti pasar”, tapi mengurungkan niatnya itu menimbang manfaat lebih

banyak daripada mudaratnya.

Perdebatan kementerian agama ini, apakah milik ormas tertentu, atau untuk umat islam saja, atau untuk semua agama. Menag Yaqut pernah mengungkapkan, “kementerian agama untuk semua agama”; ia mengucapkan selamat hari raya Naw-Ruz umat Baha’i di Indonesia. Menag Yaqut juga mengangkat staf, dan Dirjen urusan haji dan umrah dari kalangan Muhammadiyah. Beberapa terobosan yang didukung dan dikritik banyak kalangan di Indonesia.

Belajar dari sejarah, akan terus ada ketegangan dan perbedaan pandangan tentang hubungan negara dan agama di Indonesia, termasuk peran dan sepak terjang kementerian agama dan para pejabat dan seluruh jajarannya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perdebatan juga akan terus ada di kalangan ormas-ormas Islam, sejauh mana peran mereka dalam sejarah, dan sejauh mana mereka bekerja sama dengan aparaturnya Negara. Sumbangan kementerian ini, sangatlah banyak dan dirasakan berbagai level masyarakat, tentu dengan berbagai masalah, tantangan, dan kelemahan-kelemahan birokratisasi, selain peluang-peluang perbaikan dan pengembangan bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat yang lebih baik di Indonesia, termasuk riset-riset seputar agama – semua agama dan kepercayaan yang ada di negeri yang makin majemuk dan tidak kalah dinamisnya dari negara-negara lain. ■

KESELEO LIDAH OBATNYA JANGAN DIURUT

Ada dua jenis keseleo

1. Keseleo fisik atau salah urat.

Obatnya tidak terlalu susah. Datang ke tukang urut. Atau, bisa diurut sendiri dengan obat gosok.

2. Keseleo lidah atau salah ucap.

Obatnya jangan diurut. Masalahnya jadi silang sengkabut. Jangan pula dioles obat gosok. Makin digosok, makin panas.



Pernyataan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kemenag adalah hadiah negara untuk NU menuai polemik. Berbagai kalangan mengkritik keras atas pernyataannya. Bahkan kritik tersebut datang dari NU.

Dalam konfirmasinya Menag mengklaim ucapannya dalam konteks internal dengan tujuan memberikan motivasi kepada para santri, bukan untuk khalayak umum. Dan ia menyayangkan pernyataannya menjadi konsumsi publik sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

Sekum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Muti mengunggah sebuah konten tentang obat keseleo lidah di akun Instagram pribadinya @Abe_mukti, Senin (25/10).

"Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan menteri agama membuat pernyataan tersebut. Setahu saya sejarah Kementerian Agama berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama," Abdul Mu'ti

Ada 4 langkah mengobati keseleo lidah

1. Akui saja kalau memang salah ucap.
2. Minta maaf atas khilaf dan salah ucap.
3. Belajar untuk meningkatkan kualitas ilmu.
4. Berhati-hati sebelum berucap. Baik internal atau eksternal komunitas, bicaralah dengan bijak.



6 Hal yang Menentukan Arah Anda Ke Depan



Akan jadi apa Anda esok hari? Pertanyaan yang jawabannya tergantung pada jadi apa Anda hari ini. Benar tidak! Mulailah mengembangkan disiplin diri secara sederhana hari ini agar esok hari dapat disiplin dengan cara lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana?

Buatlah daftar lima bidang dalam hidup yang kamu anggap perlu disiplin

Dengan melakukan hal ini, pastinya Anda akan terbantu menjalani rutinitas Anda. Ya dikarenakan Anda tahu tujuan (goals) ke depan. Jadinya hidup Anda akan terarah dan tidak sia-sia. Urutkan kelima bidang itu sesuai prioritas Anda untuk perbaikan. Coba deh, ini sangat efektif loh.

Tangani satu demi satu

Banyak dari Anda pasti inginnya sih melakukan semua hal dalam satu waktu. Serius, Anda bisa? Dipikir-pikir dulu yah, bukanlah dapat yang Anda inginkan, tapi malah satupun tidaklah Anda gapai. Ini karena tidaklah bisa menjalankan segala sesuatu berbarengan. Hasilnya takkan maksimal yang Anda harapkan. Catet tuh!

Dapatkan sumber dan referensi yang dapat membantu

Buku, audio, success story people, dan lain-lain sangat membantu untuk menggapai apa diinginkan. Dengan instruksi dan motivasi itu sangatlah membantu untuk menaklukkan setiap bidang tersebut. Boleh juga dengan mintalah bantuan seseorang dengan karakter yang Anda harapkan untuk menjadi mentor yang membantu Anda dan membimbing ke arah yang diinginkan.

Luangkan waktu 15 menit setiap pagi

Waktu ini sangat penting buat Anda untuk tetap terfokus agar dapat mengendalikan bidang yang lemah dalam kehidupan. Setidaknya ini jadi waktu evaluasi Anda, mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Luangkan waktu lima menit di petang hari untuk mengevaluasi kemajuan Anda.

Bercerminlah terhadap diri sendiri

Selama lima menit di tengah hari dan rabalah perubahan Anda. Berikan waktu 60 hari untuk membereskan satu area kelemahan sebelum Anda melanjutkan perbaikan bidang berikutnya.

Rayakan bersama mentor

Jangan lupa nih sama yang satu ini bahwa Anda haruslah rayakan bersama mentor yang membantu perkembangan Anda, agar tetap bertanggung jawab jika Anda menunjukkan keberhasilan yang berlanjut.



Ingat, memiliki semua itu tak berarti memiliki semuanya sekaligus. Mulailah dengan hal kecil dan konsentrasi sampai sekarang. Akumulasi disiplin yang lambat kelak akan membuat Anda berubah signifikan. *(Developing the Leader Within You)*

Pilihlah satu bidang dari daftar Anda dan berdisiplinlah pada bidang tersebut hari ini.

Sukses selalu!



Zoel Rachman
Founder
carapandang.com

PRAKTIK MERESAHKAN PINJAMAN ONLINE

Seorang Satpam berinisial RAS (42 tahun) ditemukan tewas di pelataran sebuah mall setelah melompat dari atas gedung di Bekasi Selatan. Dari tempat kejadian, didapati surat wasiat yang dibawa korban berisi permintaan penjualan tanah dan bangunan. Berdasarkan penyelidikan polisi dan keterangan rekan sesama satpam, diduga kuat korban nekat mengakhiri hidup lantaran terlilit hutang pinjaman online (pinjol).

Di Kota Malang dikejutkan dengan viralnya seorang guru TK berpenghasilan Rp400 ribu sebulan karena mengaku diteror puluhan *debt collector* karena menunggak bayar hingga Rp40 juta. Rupanya, ia meminjam uang pada 24 aplikasi pinjol dan hanya 5 di antaranya yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sisanya merupakan pinjol ilegal. Walikota beserta Basnaz setempat mengambil alih pembayaran hutang, sementara OJK Malang menindaklanjuti kasus ini dengan menemui Kapolresta Malang guna membahas penanganan maraknya fintech ilegal tersebut.

Pertengahan Oktober, Polda Jabar bekerjasama dengan Polda DIY menggerebek bangunan di Sleman Yogyakarta yang diduga kantor pinjaman online ilegal dan mengamankan 83 operator serta *debt collector*. Penggerebekan ini berdasarkan laporan seorang warga Jawa Barat yang mengaku depresi



lantaran setiap hari mendapatkan tekanan, ancaman bahkan teror akibat menunggak bayar dari aplikasi pinjol.

Menurut Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Arif Rahman, kantor pinjol ini menyediakan 23 layanan aplikasi pinjol dan hanya satu aplikasi yang terdaftar di OJK, sedangkan sisanya pinjol ilegal.

“Kuat dugaan Mix-sasi aplikasi ini untuk mengelabui pelanggan seolah-olah pinjol tersebut legal, padahal hanya satu yang legal dari 23 jenis aplikasi pinjol yang dimiliki oleh platform tersebut,” kata Arif Rahman.

Dalam hal ini, OJK sebagai lembaga yang berperan menyelenggarakan sistem dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan mesti bersikap tegas. Kegiatan OJK

meliputi pengawasan di sektor perbankan, pasar modal hingga sektor jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga lainnya termasuk berbagai platform pinjaman online.

OJK perlu melakukan pengawasan ketat terkait dengan izin dan operasional berbagai platform jasa keuangan di Indonesia. Sebab itu, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi yang secara terus menerus melakukan tindakan pemberantasan pinjol ilegal dan melakukan edukasi terhadap masyarakat agar dapat cerdas memilih pinjol legal yang dilidungi OJK.

Sebelum melakukan pengajuan pinjaman pada platform pinjol, masyarakat diminta teliti dan

memastikan apakah pinjol tersebut telah terdaftar dalam OJK dengan mengakses pada laman resmi di <http://ojk.go.id>. Dengan demikian dapat meminimalisir masyarakat terjerat pinjol ilegal.

Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam Lumban Tobing menyatakan, pemberantasan pinjol ilegal paling banyak tercatat di tahun 2019. Pemberantasan itu terdiri dari sebanyak 349 investasi ilegal, 1.026 fintech P2PI ilegal dan 75 gadai ilegal.

“Sejak tahun 2018 hingga 2021, Satgas Waspada Investasi sudah menutup sebanyak 3.193 fintech ilegal,” sebut Tongam, dikutip dari situs resmi OJK.

Selain OJK, Polri juga telah melakukan berbagai upaya khusus untuk pemberantasan pinjol ilegal. Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dalam pertemuan dengan jajaran Polda secara virtual menginstruksikan jajaran kepolisian untuk melakukan langkah-langkah penanganan khusus dalam pemberantasan pinjaman online ilegal.

“Aktivitas pinjol sangat merugikan masyarakat, sehingga diperlukan langkah penanganan khusus melalui strategi preventif dan represif. Hal ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang mendapat laporan adanya praktik rentenir berkedok pinjaman online,” kata Listyo, dalam pertemuan yang diselenggarakan melalui virtual tersebut pada Selasa (21/10).

Listyo melanjutkan, pelaku kejahatan pinjol ilegal biasanya memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur menggunakan jasa layanan tersebut. Ditambah karena kondisi pandemi, dimana banyak orang terdampak

Covid-19, hal itu menjadi faktor menjamurnya pinjol ilegal.

“Bareskrim Polri sendiri telah menangani perkara pinjol ilegal sebanyak 370 kasus dan menyelesaikan 93 perkara dalam periode tahun 2020-2021,” urai Listyo.

Peran OJK

Masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada OJK apabila menemui pinjol ilegal. Berdasarkan pengaduan tersebut, OJK dapat melakukan pemblokiran dan pemberhentian usaha bagi penyelenggara yang tidak terdaftar atau tanpa izin. Masyarakat juga dapat berkonsultasi kepada OJK sebelum memanfaatkan layanan *fintech peer to peer lending* melalui kontak OJK 157 atau konsumen@ojk.go.id.

Kemudian, jika pihak pinjol ilegal melalui *debt collector*-nya melakukan tindakan penyebaran data pribadi dan menghubungi kontak yang ada dalam *handphone* atau memperlakukan bahkan mengancam terkait nyawa maka dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian menggunakan pasal Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Biasanya, teror yang dilakukan pinjol diiringi dengan penghinaan dan pencemaran nama baik yang disebarkan kepada nomor kontak di *handphone*. Jika hal ini terjadi, maka dapat dilaporkan dengan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik sehingga dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pinjol dan Masyarakat Modern

Pinjol memang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat modern

yang membutuhkan dana *cash* dengan cepat. Pengajuan pinjaman pinjol sangat mudah karena hanya perlu mengisi formulir secara *online*. Tanpa perlu mendatangi tempat peminjaman secara langsung. Tenor yang diberikan pun cukup beragam sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pinjaman 2 juta dengan tenor pembayarang bisa 7 hari hingga dua bulan.

Salah satu faktor yang memengaruhi maraknya pinjol ilegal adalah efek dari perilaku konsumtif masyarakat modern. Seperti diketahui bersama, aplikasi pinjol didahului oleh merebaknya aplikasi belanja online yang sangat digandrungi. Ini menjadi salah satu sebab lahirnya perilaku konsumtif akibat dimanjakan dengan segala sesuatu yang memudahkan.

Meski kebutuhan sandang, papan, dan pangan sudah tercukupi, namun kebutuhan dalam tatanan pergaulan sosial lainnya juga menjadi harus terpenuhi meski melalui cara-cara pintas salah satunya dengan berhutang.

Perilaku konsumtif membuat konsumen membeli barang atau produk demi sebuah pengakuan. Padahal, produk tersebut sebenarnya bukan atau kurang dibutuhkan.

Individu yang mempunyai masalah dengan ketersediaan uang untuk memenuhi kebutuhannya, akan mengambil pilihan berutang meskipun menyadari ketidakmampuannya dalam melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo.

Sikap tidak rasional dalam mengambil utang menimbulkan masalah-masalah yang lain seperti finansial (ketidakmampuan membayar hutang), sosial (konflik dengan orang lain), dan psikologis (stress, depresi bahkan tindakan bunuh diri). ■ Ika

Fokus!

Ciptakan Impian Jadi Kenyataan



Bila kita runut dari awal, bahwa setiap manusia punya potensi menjadi kaya. Anda semua memiliki pikiran, hati, energi, umur, dan waktu hidup. Kalaulah Anda gunakan semaksimal mungkin sesuai nurani Anda, dengan sendirinya akan membawa ke arah yang Anda inginkan.

Bagaimana bisa? Ya, dengan karya nyata! Bill Gates dengan software-nya, Michael Dell bikin komputer, Ford ciptakan mobil, dan masih banyak lagi. Kalo Anda bagaimana?

Hanya Ingin? Hanya Berharap?

Seringlah berlatih relaksasi, temukan ide-ide baru yang gudangnya berada di alam bawah sadar Anda. Tapi, itu tidak akan muncul bila sebelumnya tidak ada pikiran yang menjadi fokus dalam hidup kita. Ada 3 cara menggali dan menemukan:

- **Pertama**, tanyakan pada nurani diri Anda, untuk apa Anda hidup dan apa minat terbesar dalam hidup Anda? Lakukan saat hening malam. Renungkan dan dapatkanlah jawabannya. Sebagian orang sudah menemukan jawaban dari nuraninya saat umur belasan tahun. Henry Ford saat umur 12 tahun. Honda saat umur 15 tahun. Nah! Anda bagaimana?
- **Kedua**, sering-seringlah rileks atau berelaksasi dan membayangkan apa yang menjadi fokus Anda itu sudah terjadi. Asyikkan! Walaupun itu belum terjadi, tapi cara ini sangatlah penting. Rasakan rasa suka cita dalam diri Anda. Gunakan imajinasi Anda. Ulangi terus setiap malam dan setiap pagi. Jangan lupa untuk menuliskannya di selembar kertas lalu tempelkan di dekat tempat tidur. Ini penting loh! Menuliskannya membuat Anda semakin fokus untuk mencapainya. Kalau Anda tidak menuliskannya, sama saja seperti angin sepoi-sepoi. Enak tapi lewat begitu saja. Di coba yah, serius nih!

- **Ketiga**, kerjakan apa yang senang Anda kerjakan. Tentu dengan tujuan untuk mencapai apa yang telah menjadi fokus dalam hidup Anda. Kudu dicatat! Adalah sesuatu yang Anda kerjakan harus Anda senangi, cintai. Jangan terpaksa. Sudah tahu kan Anda? Kalo belum ya terus digali yah.



Zoel Rachman
Founder carapandang.com

Ford senang sekali dengan mesin mobil. **Bill Gates** cinta sekali dengan piranti lunak Komputer. Sampai kalau tidur, ngigau-nya saja 1..0..01.001 yang tidak lain adalah bahasa pemrograman. **Honda** lebih hebat lagi, meski menjabat sebagai direktur ia tetap selalu berada di bengkel dan mengutak-atik mesin. Ya kalo di Indonesia, Anda pasti ga lupa dengan **Habibi** yang akhirnya pencapaiannya dihargai di seluruh dunia, **Bob Sadino** sosok yang selalu mengenakan celana pendek dalam kesehariannya pun tak luput dari cita-cita yang besar walaupun dari seekor ayam.



Orang jarang sukses sampai ia **SENANG** dengan apa yang sedang ia kerjakan.

Dale Carnegie

Anda Bagaimana?

Intinya Anda harus senang mengerjakannya. Kalau Anda merasa terpaksa, pikiran Anda akan buntu, jiwa tertekan. Bukan ide kreatif yang muncul tapi malah 'jalan pintas' yang justru menyesatkan.

Sukses untuk Anda!

Kemensos Tingkatkan Literasi Penerima Manfaat Melalui Pocadi di 41 UPT

JAKARTA (22 Oktober 2021) – Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan literasi bagi Penerima Manfaat (PM) di 41 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia dan secara resmi melalui Pojok Baca Digital (Pocadi).

Penyediaan Pocadi ini bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Indonesia untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan peningkatan literasi melalui pemanfaatan dan pengembangan perpustakaan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando telah sepakat menjalani kerja sama mengembangkan Pocadi pada 23 September 2021 lalu.

Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial para penerima manfaat.

Juga, pertukaran data dan informasi dan penyediaan tenaga ahli serta sarana dan prasarana untuk mendukung program/kegiatan yang disepakati bersama. Lalu peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program/kegiatan yang disepakati serta diseminasi dan publikasi hasil kerja sama.

Pocadi merupakan model perpustakaan dengan format buku digital (e-book) dan layanan buku tercetak yang diharapkan bisa mendorong peningkatan budaya literasi di tengah masyarakat, salah satunya di balai-balai rehabilitasi sosial milik Kementerian Sosial.

Selain itu, Pocadi menggunakan konsep digital library dalam membangun interaksi pemustaka untuk saling berinteraksi melalui fitur yang ada dalam aplikasi iPusnas dengan meminjam, membaca dan berbagi koleksi dan informasi.

Kelebihan dari fitur tersebut menjadikan kegiatan meminjam dan membaca buku digital serta berdiskusi antar pembaca dapat dilakukan oleh penerima manfaat maupun pegawai instansi Kementerian Sosial di manapun kapanpun tanpa batas ruang dan waktu.

Salah satu dari sekian balai yang sudah dilengkapi dengan Pocadi adalah Balai Paramita Mataram. “Pocadi sangat cocok berada di balai-balai milik Kementerian Sosial RI yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia,” ujar Kepala Balai



Paramita Mataram, I Ketut Supena.

Menurut I Ketut, balai-balai sebagai gambaran organisasi Kemensos RI perlu menampilkan pelayanan publik yang prima, salah satunya yang dibantu dengan adanya fasilitas Pocadi.

“Kehadiran Pocadi turut membantu penyediaan sarana belajar dan informasi yang up to date di Balai, seperti yang kita tahu pengadaan maupun penggunaan buku/media lainnya secara fisik memerlukan biaya dan pemeliharaan yang tidak sedikit,” katanya.

Ke depan, akan lebih banyak konten yang bisa diakses, mulai dari buku-buku populer maupun buku anak adalah salah satu contoh buku yang akan sering diakses oleh para penerima manfaat maupun pengunjung Balai Paramita Mataram.

“Adanya Pocadi menjadikan pembelajaran dan penyebaran informasi lebih efektif dan efisien, sehingga proses rehabilitasi sosial kepada penerima manfaat juga dapat berjalan dengan lebih baik,” pungkas I Ketut.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI

Klik, follow & subscribe website & medsos kami

Website: <https://kemensos.go.id/>
Facebook: Kementerian Sosial RI
IG: @kemensosri
Twitter: @kemensosri
TikTok: @kemensosri
Youtube: Kemensos

Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 resmi ditutup pada Jum'at (15/10). Jawa Barat berhasil menjadi juara umum dan memunggungi DKI Jakarta yang bertengger di peringkat kedua. Pembinaan atlet sejak dini menjadi kunci keberhasilan Jabar memenangkan perhelatan nasional terbesar itu.



KOMPETISI USIA DINI, MODAL KEMENANGAN JABAR

Jawa Barat didaulat sebagai Juara Umum PON XX 2021 di Papua. Jabar berhasil memperoleh 353 medali dengan rincian 133 emas, 105 perak dan 118 perunggu. Sementara pada posisi kedua diraih DKI Jakarta. DKI Jakarta mendapatkan

110 emas, 91 perak 100 perunggu. Sedangkan di posisi ketiga ada provinsi Jawa Timur yang mendapatkan perbedaan hasil tipis di belakang Jakarta dengan menyabet 110 emas, 89 perak dan 88 perunggu.

Adapun tuan rumah pelaksanaan



PON tahun ini, yaitu Papua berhasil mendapatkan peringkat keempat, dengan perolehan medali 93 emas, 66 perak dan 102 perunggu. Bagi Papua, posisi ini telah memenuhi target awal yaitu posisi lima besar klasemen.

Bagi Jabar, perolehan juara umum tahun ini bukanlah pertama kali. Pada perhelatan sebelumnya, tepat ketika Jabar menjadi tuan rumah pada 2016, provinsi ini menjadi juara umum. Keberhasilan serupa juga pernah ditorehkan pada PON 1951 dan 1953.

Perolehan juara umum tersebut membuat Gubernur Jabar Ridwan Kamil berbangga hati. Dalam unggahan melalui *Instagram* pribadinya, pria yang kerap dipanggil dengan sebutan Kang Emil tersebut membagikan



kebahagiannya atas pencapaian yang telah diperoleh warganya dalam perhelatan ini. Bahkan, Kang Emil memberikan pantun di momen bahagia tersebut.

Dia menyebutkan, keberhasilan kali ini menjadi bukti bahwa Jabar tak hanya sekadar jago kandang.

"Bawa tomat sekiloan ke Ujungpandang. Jawa Barat juara, dan bukan jago kandang. Di tanah legenda kita juara, di tanah Papua kita pun juara," ujar Kang Emil.

Selain itu, Kang Emil juga membagikan video singkat dengan menunjukkan perolehan atletnya dalam kompetisi ini. Pemimpin yang dikenal dengan gaya yang santai ini merasa bersyukur dengan perolehan timnya.

"Alhamdulillah, atas izin dan ridho Allah SWT, Hari ini, secara resmi Jawa Barat menjadi juara umum PON 20 di Papua. 133 emas. 105 Perak dan 118 Perunggu. Buah pembinaan, kerja keras dan sports science," lanjutnya.

Lalu, apa kunci yang dipegang Jabar sehingga meraih juara umum pada

PON tahun ini? Kunci utama untuk meraih kemenangan dalam kompetisi ini adalah sistem pembinaan atlet yang dilakukan KONI dan Pemda, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Kang Emil, menjangkit bakat sejak dini yang dimulai dari kabupaten/kota menjadi penentu untuk meraih prestasi.

"Tingkatan kejuaraan tersebut dimulai dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi. Tujuannya adalah untuk mencari bakat-bakat terbaik di bidang olahraga sejak usia dini," sambung Kang Emil.

Dalam sebuah acara *live Instagram* bersama media pada Senin (11/10), Kang Emil menjabarkan bahwa pembinaan atlet telah dimulai dari PON versi anak-anak. Setelah bibit-bibit tersebut ditemukan, anak-anak kemudian dimasukkan ke Pusat Pendidikan dan Latihan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP).

Hal itu dimaksudkan agar anak-anak yang mempunyai

“Tingkatan kejuaraan tersebut dimulai dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi. Tujuannya adalah untuk mencari bakat-bakat terbaik di bidang olahraga sejak usia dini,”

Ridwan Kamil, Gubernur Jabar

bakat olahraga tersebut bisa terasah. “Setelah disaring dari pekan pelajar itu, kita punya PPLP. Jadi anak-anaknya ditarik ke sekolah khusus yang memprioritaskan kesehariannya dalam olahraga,” ucap Kang Emil.

Tak hanya kompetisi usia dini, kompetisi olahraga di Jabar juga melebarkan sayap ke beberapa event olahraga antar-daerah. Seperti Pekan Olahraga Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pekan Olahraga Pesantren hingga Pekan Olahraga Daerah (PORDA). “Kemudian kita melebarkan pekan olahraganya ke semua usia, ada pekan olahraga PNS, Pekan Olahraga Pesantren, ada PORDA,” tambah Ridwan Kamil.

Kang Emil menambahkan, bahwa Jabar telah memiliki sistem pembinaan olahraga mulai dari usia dini seperti digelarnya Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Selain daripada itu, kerja keras dari para atlet dan official pelatih juga tidak kalah penting untuk meraih kemenangan.

Kemenangan Jabar, bagi Kang Emil, tak terlepas dari dukungan banyak pihak yang sudah terlibat. Melalui kesempatan itu pula, ia turut mengungkapkan rasa terima kasih, termasuk untuk masyarakat Jabar.

“Terima kasih kepada para atlet, pelatih, ofisial, pengurus cabang olahraga, KONI Jabar, kabupaten dan kota, Dispora, para kepala daerah, DPRD Jabar/Kota/Kab, dan semua masyarakat jabar yang selalu mendukung dan mendoakan. Hatur

nuhun,” imbuhnya.

Selain itu, sebagai ucapan terima kasih atas pencapaian para atletnya, Jabar telah menyiapkan bonus bagi para atlet karena telah meraih juara dan mempertahankan gelar juara untuk Jabar.

Apresiasi Pemerintah

Pesta penutupan PON digelar di Stadion Lukas Enembe, Jayapura dengan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Melalui sambutannya, Maruf mengapresiasi masyarakat Papua yang telah berhasil menyukseskan gelaran olahraga terbesar secara nasional tersebut. Walaupun sebelumnya sempat tertunda selama setahun akibat pandemi, namun akhirnya bisa berjalan dengan baik.

“Ini merupakan PON tersulit, namun masyarakat Papua, warga Papua, berhasil menyelenggarakannya dengan sempurna. Sesuai dengan semboyan torang bisa, yang bukan hanya semboyan, namun juga terbukti,” tambah Maruf.

Dua hari sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyampaikan, penyelenggaraan PON Papua 2021 berjalan lancar dan tanpa ada gangguan.

“Sampai hari ini secara keseluruhan PON berjalan dengan lancar dan tanpa ada hal yang muncul signifikan mengganggu,” kata Menpora seperti dikutip dari kemenpora.go.id pada Rabu (13/10).

Penting diketahui, PON 2021 menyelesaikan 681 nomor pertandingan dari 56 cabang olahraga atau disiplin pertandingan, serta diikuti oleh 7.039 atlet dari 34 propinsi di Indonesia.

■ Amir Rifai





JAWA BARAT SANG JUARA BERTAHAN PON

Jawa Barat berhasil menjaga gelar juara umum PON dan mengulangi capaian sejarah pada 1951 dan 1953 silam sebagai juara dua kali beruntun. Gelar juara tahun ini menjadi koleksi kelima Jawa Barat dalam sejarah PON.



PEROLEHAN MEDALI



TOTAL MEDALI 353

JUMLAH KONTINGEN



770
Atlet



394
Manajer dan ofisial



75
Lainnya

Total 1.239

37 cabang olahraga yang diikuti.

Juara Umum



TOREHAN SEJARAH JABAR PADA GELARAN PON

Tuan Rumah

- PON V 1961
- PON XIX 2016



**Dua kali juara bertahan.
Selalu menjadi juara di kandang.**

“

Ini bukan sekadar prestasi medali, namun bukti cinta para atlet kepada Jawa Barat, buah dari ketekunan.

Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat



DI BALIK KEMENANGAN JABAR



Penerapan sport science
dalam persiapan.



Kolaborasi dengan perguruan tinggi.



Perpaduan fisik dan ilmu pasti.



Pembinaan yang konsisten.



Kompetisi beragam kelompok usia.



Pembinaan atlet di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP).

KEKOMPAKAN, KUNCI SUKSES KEMENANGAN

Setelah penantian panjang selama 19 tahun, Indonesia akhirnya kembali menjuarai ajang bulu tangkis bergengsi *Thomas Cup 2020*. Kemenangan ini diraih usai mengalahkan Cina dalam putaran final di Arena, Aarhus, Denmark pada Minggu (17/10) dengan skor 3-0.



Pemain tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting membuka keunggulan Indonesia usai menang atas Lu Guang Zu. Ginting meraih kemenangan tiga gim dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16.

Sementara itu, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang turun sebagai ganda putra pertama pada final menang *straight game* alias dua gim langsung melawan He Ji Ting dan Zhou Hao Dong dengan skor 21-12 dan 21-19. Sedangkan, Jonatan Christie, setelah bertarung selama 1 jam 22 menit berhasil menuntaskan kemenangan Indonesia setelah melawan Li Shi Feng. Skor yang diraih yaitu 21-14, 18-21, dan 21-13.

Keberhasilan ini memastikan Indonesia menjuarai trofi Piala Thomas untuk pertama kalinya sejak 19 tahun lalu.

Kemenangan ini berhasil menjadikan Indonesia dengan gelar kejuaraan terbanyak beregu putra sebanyak 14 kali. Perjalanan tim yang tidak mudah karena melalui fase grup dengan tim-tim tangguh dari berbagai negara.

Namun, yang sangat disayangkan ketika merayakan kemenangan tersebut bendera Merah Putih tidak bisa berkibar. Hal ini terjadi karena adanya sanksi yang diberikan Badan Antidoping Dunia/*World Anti-Doping Agency* (WADA) kepada



Indonesia.

Indonesia dinilai tidak mematuhi prosedur antidoping dalam program *test doping plan* (TDP), sehingga sanksi tersebut mengharuskan dilarangnya bendera Merah Putih berkibar di kemenangan tim Indonesia. Dari sanksi yang diberikan WADA ini juga nantinya Indonesia tidak akan bisa menjadi tuan rumah *event* olahraga.

Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Bambang Roedyanto menanggapi sanksi yang tidak mengizinkan Indonesia menjadi tuan rumah *event* olahraga itu dengan mengatakan, Indonesia tidak bisa *bidding* tuan rumah Kejuaraan Dunia, Asian Games, SEA Games, Kejuaraan Dunia Junior, Piala Thomas dan Uber, dan Piala Sudirman.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menanggapi sanksi WADA tersebut karena tidak bisa memenuhi sampel uji doping 2020 dan 2021. Hal tersebut terjadi akibat terhentinya kegiatan-kegiatan

olahraga di Indonesia karena pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, Zainudin telah mengambil langkah cepat untuk mengklarifikasi dimana letak tidak patuhnya tim Indonesia. Ternyata, lebih kepada pengiriman sampel. Langkah yang tepat dari Kemenpora tersebut berhasil membuat WADA bersedia menunggu sampel uji doping. Mudah-mudahan test doping plan (TDP) Indonesia dapat terpenuhi dan sederet ajang kejuaraan bergengsi Internasional diizinkan untuk dilaksanakan di Indonesia.

Kunci Meraih Kemenangan

Kemenangan bersejarah yang diraih Indonesia tidak terlepas dari kekompakan semua anggota tim. Latar belakang yang berbeda dari setiap anggota juga menandakan kebersamaan menjadi faktor utama meraih keberhasilan.

Dalam berbagai cabang olahraga, Indonesia sudah sangat banyak

mendapatkan gelar juara dunia, terutama di cabang olahraga bulutangkis. Kebersamaan dan kekompakan tersebut adalah bukti nyata.

Tentu, semangat ini yang harus selalu disematkan dan ditanamkan kepada seluruh olahragawan yang mewakili Indonesia di ajang Internasional. Meskipun dalam banyak hal kita masih jauh tertinggal seperti di cabang olahraga Sepakbola, Basket, Voli dan lain sebagainya. Namun, optimisme harus senantiasa tumbuh.

Atmosfer persaingan untuk meraih gelar juara dalam pentas olahraga pasti terasa panas. Belum lagi dihadapkan dengan kondisi peraturan yang ketat dan berliku. Akan tetapi, keberhasilan Indonesia menjadi yang pertama atas perolehnya dalam ajang bulutangkis tersebut bisa dijadikan motivasi kita bersama. Bahwa, tanpa kebersamaan dan kekompakan dalam kompetisi tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan. ■ **Aldi**

KORUT UJI COBA RUDAL BALISTIK, SEMENANJUNG KOREA MENEGANG

Korea Utara (Korut) mengonfirmasi telah melakukan uji coba peluncuran rudal balistik kapal selam/ *Submarine Launched Ballistic Missiles* (SLBM) pada Rabu (19/10). Kantor berita Korut KCNA mengatakan, rudal balistik itu mempunyai banyak teknologi panduan kontrol canggih yang bisa ditembakkan dari kapal selam. Pengujian ini sama halnya pada uji coba di tahun 2016.

Sementara itu, peluncuran rudal balistik itu tidak menyebut nama

Kim Jong Un sama sekali. Pemimpin nomor satu Korut itu tidak hadir dalam peluncuran tersebut.

SLBM yang diluncurkan pada uji coba kali ini merupakan tipe baru. Selain menampilkan teknologi panduan kontrol yang canggih, ia juga punya mobilitas sayap dan mobilitas lompat luncur.

“SLBM akan sangat berkontribusi untuk menempatkan teknologi pertahanan negara pada tingkat tinggi. Rudal balistik ini untuk meningkatkan kemampuan operasional bawah laut

angkatan laut kita,” tambah KCNA.

SLBM yang berukuran lebih kecil dapat lebih banyak menyimpan rudal di satu kapal selam, meskipun dengan jangkauan yang lebih pendek. Ini berpotensi menempatkan Korut yang bersenjata nuklir semakin dekat untuk menurunkan kapal selam rudal balistik.

Media Korea Selatan (Korsel) melaporkan bahwa rudal balistik ini diyakini telah memempuh jarak sekitar 450 km pada ketinggian maksimum 60 km. Pada Oktober 2019, Korut juga telah meluncurkan rudal balistik dari kapal selam yang disebut Pukguksong-3.

Perlombaan Rudal di Semenanjung Korea

Korut telah melakukan serangkaian uji coba rudal dalam beberapa pekan terakhir, termasuk senjata teknologi hypersonik dan senjata jarak jauh. Beberapa uji coba tersebut melanggar sanksi internasional yang dijatuhkan secara ketat kepada negara pemerintahan Kim Jong Un itu. Sedangkan rivalnya, Korsel secara khusus dilarang oleh PBB untuk menguji coba peluncuran rudal balistik serta senjata nuklir.

PBB menganggap rudal balistik lebih mengancam daripada rudal jelajah karena dapat membawa muatan yang lebih kuat, memiliki jangkauan yang lebih jauh dan dapat meluncur dengan cepat. Peluncuran rudal balistik Korut terdeteksi mendarat di Laut Timur, yang dikenal dengan Laut Jepang. Rudal diluncurkan melalui Pelabuhan Sinpo, di mana Korut biasa menempatkan kapal selamnya.

Uji coba peluncuran rudal balistik juga baru terjadi di Korea Selatan. Hal ini, menurut pengamat, seperti perlombaan senjata di Semenanjung





Korea. Korsel juga diketahui segera meluncurkan roket luar angkasanya sendiri.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan, penembakan dua rudal balistik ini sangat mengecewakan. Rudal Korut ditembakkan dari sudut tinggi untuk meminimalkan “ancaman eksternal”.

“Namun jika rudal diluncurkan dalam lintasan standar, bukan vertikal, ia bisa menempuh jarak 1.900 km. Jarak itu akan mampu menghantam Korea Selatan dan Jepang,” sebut Fumio.

Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi juga mengatakan, salah satu dari

rudal itu mendarat tepat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Dengan demikian, rudal tersebut mencatat jangkauannya sejauh 600 kilometer dan ketinggian maksimum 50 kilometer.

Kubu Selatan Tak Tinggal Diam

Merespons perkembangan senjata nuklir Korea Utara, kepala intelijen Korea Selatan, Jepang dan AS berkumpul di Seoul untuk membahasnya. Perwakilan dari ratusan perusahaan internasional dan militer internasional juga berkumpul di Seoul untuk upacara pembukaan Pameran Dirgantara dan Pertahanan

Internasional (ADEX).

Ini akan menjadi pameran pertahanan terbesar Korsel yang pernah ada, dengan menampilkan pesawat tempur generasi berikutnya, helikopter serang, drone, dan senjata canggih lainnya, serta roket ruang angkasa dan desain kedirgantaraan sipil.

Sementara itu, Cina mendesak semua pihak di Semenanjung Korea untuk menahan diri dan mematuhi penyelesaian perselisihan secara politik.

“Saat ini, situasi di Semenanjung (Korea) berada pada titik kritis. Pihak-pihak terkait harus fokus pada situasi keseluruhan, menahan diri, berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung (Korea), mematuhi arah dialog dan negosiasi yang benar, dan mengikuti pendekatan jalur ganda dan prinsip bertahap dan sinkron, sehingga dapat bersama-sama bekerja untuk penyelesaian politik masalah Semenanjung”, kata diplomat Cina itu seperti dikutip dari *Sputnik*, Selasa (19/10).

Utusan AS untuk Korsel Sung Kim diperkirakan akan membahas bagaimana memulai kembali dialog dengan Pyongyang, termasuk apakah harus ada deklarasi resmi berakhirnya Perang Korea. Kim Sung menegaskan kembali sikap Pemerintah AS Joe Biden yang membuka diri untuk berdialog dengan Korea Utara melalui beberapa persyaratan.

Pembicaraan sebelumnya antara AS dan Korut gagal karena ketidaksepakatan mendasar tentang denuklirisasi. AS ingin Korut menyerahkan senjata nuklirnya sebelum sanksi internasional kepada negara tersebut dilonggarkan, namun negara tersebut menolaknya. ■ **Ilka**

JEBAKAN UTANG NEGERI PANDA

Lembaga riset asal Amerika Serikat (AS) AidData menyebut Indonesia tengah memiliki utang kepada Cina sebesar Rp245 triliun (USD17,28 milyar). Pemerintah tidak berutang secara langsung, tetapi dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sejumlah bank berpelat merah.

Sebagian besar utang tersebut dipakai untuk pembangunan *Belt and Road Initiative* (BRI). Salah satunya yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang mengalami kemacetan pendanaan. Karena itu, Presiden Jokowi mengizinkan dana APBN untuk dialokasikan ke proyek tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2021.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memaparkan, keputusan tersebut diambil setelah adanya konsorsium empat perusahaan pemerintah yang ditugaskan dalam proyek itu mengalami gangguan keuangan akibat Covid-19. Empat perusahaan yang terlibat di antaranya PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Keputusan itu mengingkari pernyataan Jokowi sebelumnya yang menyebut untuk tidak menggunakan APBN dalam pembiayaan proyek kereta cepat. Akan tetapi, pemerintah akan melakukannya melalui

pendekatan bisnis ke bisnis (*bussines to bussines*). Namun, seperti angin berlalu, peraturan baru itu secara tidak langsung membatalkan janji-janji Jokowi selama ini.

Sejak rencana awal proyek ini sudah menimbulkan polemik, mulai dari pengabaian studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), hingga kesulitan keuangan. Akibatnya, proyek ini pernah mengakibatkan ledakan pipa Pertamina di jalan tol Cipularang, amblesnya ruas jalan di eks jalan nasional Bandung Barat akibat pembangunan *outlet tunnel* 8 kereta cepat, banjir di jalan tol Purbaleunyi kilometer 130 akibat curah hujan tinggi, dan lainnya.

Kenyataan tersebut jelas mengundang reaksi beberapa tokoh, salah satunya pemerhati ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri. "Proyek ini adalah proyek mubazir. Proyek ini tidak menguntungkan secara bisnis. Bahkan, sampai kapan pun tidak akan bisa balik modal. Proyek ini hanya akan menghabiskan uang rakyat," jelas Faisal Basri.

Faisal menambahkan, membengkaknya anggaran adalah faktor utama penyebab proyek ini terlilit hutang. Hal ini juga dipicu karena perencanaan yang mentah dan serba instan. Akhirnya, pemerintah membuka karpet merah kepada Cina. Meskipun tidak melibatkan APBN di awal, namun pada kenyataannya ketika



pembiayaan macet, APBN menjadi jalan pintas untuk membiayai proyek tersebut.

Salah satu penyebab pemerintah membuka jalan mulus karena Cina telah menawarkan kemudahan, yaitu dengan bunga utang yang relatif murah. Ini lebih menarik karena berbeda



dengan negara-negara pendonor lain yang memberikan bunga lebih besar.

Akan tetapi, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, permasalahan ini memiliki risiko yang tinggi. Sebab, Cina cenderung melakukan *feasibility studies* agar

negara peminjam bisa mempercepat pengerjaan proyek. Apabila kemudian memiliki masalah, beban dan kerugian ditanggung negara peminjam yang menjadikan proyek tersebut sebagai jaminan kredit.

“Seperti itulah gambaran yang dianggap sebagai jebakan hutang.

Terkesan positif dan menawarkan berbagai kemudahan. Namun, pada akhirnya negara peminjam yang menanggung beban utang dan dengan mudah Cina menguasai kepemilikan infrastruktur tersebut,” kata Bhima Yudhistira.

Keluar dari Jebakan

Persoalan utang yang sangat pelik dalam berbagai proyek pembangunan menandakan bahwa negara ini masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap negara lain. Meskipun proyek kereta cepat yang tidak begitu penting ini sudah terlanjur dan akan mengancam dana pemerintah, langkah ke depan harus lebih bijak dan tidak tergesa-gesa.

Salah satu langkah efektif yang mesti dilakukan pemerintah, yang paling utama adalah mengurangi atau bahkan meninggalkan ketergantungan terhadap Cina. Selain itu, lebih baik melakukan diversifikasi kerja sama internasional yang bisa menjadi alternatif agar tidak tergantung kepada satu negara saja terutama dalam proyek-proyek strategis.

Selanjutnya, apabila pemerintahan Jokowi ingin meninggalkan warisan (*legacy*) berupa infrastruktur, lebih baik terbuka dan mempertimbangkannya secara matang. Proyek kereta cepat yang memiliki banyak masalah tersebut adalah fenomena pengelolaan yang buruk dan tidak transparan.

Inilah yang harus menjadi evaluasi besar bagi pemerintah. Apabila di awal, publik mendengar dan menyimak kajian dari akademisi maupun LSM, tentu akan terarah dan tidak sia-sia. Dana bernilai besar juga akan jauh lebih bermanfaat untuk pembangunan sosial ketimbang proyek yang jelas-jelas bakal merugikan negara ini. ■

Aldi

MENJAGA POLITIK MORAL BANGSA

Hasrat terhadap kuasa kerap melumpuhkan nalar seseorang. Jika pikiran dijajah dengan ambisi politik yang menjatuhkan, saling jegal dengan kekuatan modal, maka akan sangat mungkin politik yang demikian hanya akan berujung pada konflik horisontal.

Maret lalu, KPK melaporkan sebanyak 429 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Angka itu belum terhitung sejumlah kepala daerah lain yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT), seperti Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo), Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk), Budhi Sarwono (Bupati Banjarnegara), dan Anzarullah (Bupati Kolaka Timur).

Dibutuhkan alam pikir masyarakat yang jernih untuk membersihkan praktik-praktik politik kotor tersebut. Sebab, politik bukanlah semata berorientasi pada kekuasaan. Lebih dari itu, politik berkedudukan penting untuk tata pemerintahan dan sosial yang lebih baik. Praktik politik yang kotor hanya akan berakhir seperti para pejabat kepala daerah yang terjerat OTT KPK.

Masyarakat sangat menyadari arti penting politik tersebut. Karena itu, sebagai warga negara, secara sadar mereka bisa mengerti mana calon pemimpin yang baik dan tidak. Mereka juga bisa melibatkan diri dalam percaturan politik, juga memberikan suaranya dengan menjadi pengontrol kebijakan atau kelompok penekan pemerintah.

Dalam hal ini, masyarakat politik tidak sekadar entitas cair yang tak bisa terkonsolidasi. Tidak selamanya mereka bisa dikendalikan oleh kekuatan uang atau kekuatan

lainnya. Mereka bisa berkonsolidasi antar sesama dan terlibat mengambil peran ketika negara tidak hadir dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Masyarakat politik yang sadar dan terkonsolidasi dapatlah diambil contoh dari Muhammadiyah. Keterlibatan organisasi Islam yang berdiri pada 18 November 1912 ini dalam urusan pemajuan bangsa tidak bisa diragukan. Pada kategori ini, kita bisa menyebut Muhammadiyah sebagai masyarakat politik yang menjadi pendulum perdamaian yang berimajinasi pada keadilan dan berpihak pada kemanusiaan.

Muhammadiyah memiliki elan vital yang sama besarnya dengan kelompok epistemik lain yang mengambil peran penting menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan. Meminjam istilah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, dalam kondisi saat ini Muhammadiyah menjadi penegak politik moral kebangsaan.

Ibarat dua mata pisau, di satu sisi politik menjanjikan kesejahteraan, namun juga bisa menjadi akar konflik pada sisi yang lain. Muhammadiyah memilih mata pisau yang berorientasi pada pemakmuran warga dan kemajuan negara. Hingga lebih dari seabad usianya, Muhammadiyah lebih tertarik pada upaya membangun gagasan negara yang berperadaban.

Sebagai organisasi masyarakat Islam tertua di Indonesia, Muhammadiyah memiliki pesebaran kader yang terpusat dan merata. Di antara mereka banyak yang bergerak di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Dengan modal sosial yang begitu besar, membicarakan konflik politik, sangatlah terlalu sempit dan sia-sia bagi Muhammadiyah.



Abdurrahman Sofyan
Pegiat Literasi di Komunitas Kalimetro Malang

Apalagi, di sisi yang lain, ada begitu banyak urusan kemanusiaan yang butuh penanganan secara cepat, seperti persoalan terorisme, narkoba dan korupsi. Tiga persoalan serius yang sedang dihadapi bangsa ini.

Urusan politik memang tidak ada habisnya. Jika gerak Muhammadiyah hanya sibuk merespons politik kepentingan, tanpa pertimbangan yang cermat konflik politik hanya akan berujung pada pertentangan identitas. Hal ini akan menyebabkan kepiluan yang berkepanjangan, menenggelamkan imajinasi hidup bersama yang harmonis, serta menggantikan sikap percaya dengan sikap saling curiga antar warga.

Jika konflik terjadi, maka narasi yang akan selalu muncul tidak lain adalah sikap permusuhan satu dengan yang lain. Ketegangan dalam konflik yang mengaitkan segalanya dengan keistimewaan identitas tak ubahnya sedang menggali lubang celaknya sendiri.

Lambat laun, dari aspek agama, mengutip Charles Campbell (2013), pesonanya secara perlahan akan memudar dan sikap saling curiga menjadi lebih dominan. Dengan demikian, agama -yang diwakili elemen-elemen sosialnya- berpeluang membusuk dan korup.

Akhirnya, politik tanpa moralitas akan menjerembabkan para pengagungnya pada penghakiman kebenaran tunggal dari kelompoknya. Sementara itu, politik yang hanya bertujuan pada meninggikan sebagian golongan dan segelintir kepentingan akan berakhir pada kekacauan atau anarki.

Politik dan moralitas tidak bisa berjalan sendirian di Indonesia. Untuk itu, perlu ada keseimbangan di antara keduanya. Pada posisi inilah, sesungguhnya kita mendapati Muhammadiyah sebagai organisasi Islam

bisa berpijak sebagai agen politik yang memegang nilai-nilai moralitas. Melalui konsep Islam Berkemajuan, Muhammadiyah berperan menjadi penegak politik moral kebangsaan.

Muhammadiyah sebagai penegak politik moral kebangsaan tidaklah berada di posisi aman yang tanpa kritik. Ia berjalan di atas “karang”, di mana sektor politik tengah mengalami degradasi moral oleh maraknya perilaku elit yang korup dan menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai kepentingan mereka. Menurut Haryono (2014), moral dan etika berpolitik tidak lagi mewarnai tujuan hidup bersama para elit dan warga negeri ini.

Untuk menguatkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan negeri ini, Muhammadiyah harus tetap berkomitmen membangun peradaban yang berkeadilan, bermartabat, berprikemanusiaan dan berkemajuan.

Tentu saja, pekerjaan membangun peradaban dengan menjaga politik moral bangsa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangannya sungguh berat, terlebih korupsi telah menjadi “budaya” yang mengakar dalam alam pikiran elit politik negeri ini. Meski sudah banyak pejabat yang masuk penjara karena penyakit ini, tapi mereka seperti tak mengenal kata jerah.

Namun, bagi Muhammadiyah, menyuarakan suara kenabian dengan berpegang teguh pada politik moral juga sama tidak kenal kata menyerah. Pengabdian terhadap negara tercinta ini sudah dibuktikan oleh Muhammadiyah lebih dari satu abad sejak organisasi ini berdiri. Ia akan tetap kokoh mendukung pemajuan bangsa ini sesuai dengan komitmennya yang termuat dalam Darul Ahdi wa Syahadah. ■

UMKM DIGITAL, BERTAHAN DI TENGAH BADAI KRISIS

Pandemi Covid-19 tak kunjung usai. Meski tingkat penyebarannya mulai tampak menurun, namun kewaspadaan terhadap virus ini harus tetap menjadi skala prioritas. Sebab itu, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Persoalannya, PPKM Darurat ternyata berimbas pada aktifitas perekonomian masyarakat. Setidaknya terdapat tiga dampak yang cukup signifikan akibat PPKM Darurat tersebut, yaitu: *Pertama*, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi. Pemberlakuan aturan pembatasan itu dioreksi akan mampu menurunkan investasi dan daya konsumsi masyarakat. Akibatnya, akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Kuartal III tahun ini.

Belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa PPKM Darurat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami pelambatan di angka 4-5,4 persen.

Kedua, PPKM Darurat mengakibatkan terjadinya peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan pembatasan jam kerja, biaya operasional perusahaan tidak dapat tertutupi oleh pendapatan. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus memutar otak untuk menutupi biaya tersebut. Tak ayal, salah satu cara pelaku industri mengantisipasi hal tersebut adalah dengan cara merumahkan, memangkas upah, atau bahkan menjatuhkan PHK pada karyawan.

Ketiga, PPKM Darurat bias melumpuhkan hampir seluruh sektor usaha. Hal ini dikarenakan PPKM Darurat

mengatur pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung. Bagi pelaku usaha, tentu peraturan tersebut menurunkan *omzet*, *profit*, dan *cash flow* mereka.

Langkah Pemerintah

Di tengah ketidakpastian ekonomi di masa mendatang, Pemerintah terus mengambil berbagai langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional seperti menerbitkan kartu sembako, memperpanjang stimulus program ketetangalistrikan, penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan kepada UMKM.

Demi mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini, pemerintah mengeluarkan dana bantuan sosial tunai sebesar Rp699,4 triliun yang sebelumnya hanya sebesar Rp695 triliun. Dana tersebut sudah termasuk biaya untuk memperdayakan UMKM sebesar Rp191,13 triliun. Program Pemulihan Ekonomi Nasional juga diharapkan dapat membantu menekan angka penurunan konsumsi masyarakat. Jika konsumsi masyarakat menurun, hal tersebut juga akan memberikan dampak buruk banyak sector ekonomi, salah satunya adalah penurunan penjualan UMKM.

Dampak Pandemi Terhadap UMKM

Dalam konteks ini, UMKM merupakan salah satu sektor yang terpukul cukup keras. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Katadata Insight Center (2020), kondisi UMKM sebelum pandemi berada dalam keadaan baik. Namun, saat pandemi sebanyak 56,8% UMKM berada dalam kondisi buruk, hanya 14,1% UMKM yang berada dalam kondisi baik.

Selain itu, sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari pandemi ini. Hanya 5,9% UMKM



Muhammad Farros Imaroh
Pemerhati Ekonomi
RBC Institute A. Malik Fadjar
Universitas Muhammadiyah Malang

yang mengalami dampak positif. Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet.

Berbagai langkah dilakukan para pelaku UMKM untuk dapat bertahan di tengah krisis pandemi. Mereka melakukan sejumlah langkah seperti: pengurangan produksi barang atau jasa, pengurangan jam kerja, pengurangan karyawan dan pengurangan saluran penjualan.

Pemanfaatan Ekonomi Digital

Meski demikian, ada juga UMKM yang mengambil langkah untuk menambah saluran pemasaran sebagai strategi untuk bertahan di masa pandemi. Di sinilah penjualan online melalui pemanfaatan ekonomi digital dapat menjadi solusi alternatif. Terlebih, momentum ini sangat tepat mengingat selama satu dekade terakhir, ekonomi digital telah berkembang demikian pesat di Indonesia.

Bank Indonesia mencatat nilai ekonomi dari transaksi *e-commerce* terus meningkat selama empat tahun terakhir. Pada 2021, diprediksi nilai ekonomi dari *e-commerce* akan terus tumbuh dan mencapai Rp354 triliun. Volume transaksi di *e-commerce* juga meningkat setiap tahunnya. Diprediksi volume transaksi pada tahun 2021 mencapai 1,3 miliar atau meningkat sebesar 38,17 persen. Indonesia sendiri memiliki visi pada tahun 2025 menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dengan transaksi ekonomi digital mencapai USD130 Miliar.

Ekonomi digital merupakan pilihan paling praktis dan aman bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produk dan jasa. Berdasarkan hasil survei *Global Web Index* (2020), sebanyak 46% responden akan lebih sering belanja online pada masa pandemi. Sebelum pandemi, masyarakat

hanya membeli barang sekunder dan tersier secara online. Namun, setelah adanya pandemi pembelian barang kebutuhan pokok secara online mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dengan pemanfaatan ekonomi digital, pelaku UMKM dapat melakukan pemasaran tanpa batas. Namun perlu diingat bahwa persaingannya juga sangat banyak, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Karena itu, pelaku UMKM perlu memperhatikan kualitas produk yang akan mereka pasarkan.

Selain berdampak kepada pelaku UMKM, penjualan melalui kanal-kanal ekonomi digital juga berdampak pada perekonomian nasional. Sebab, pasar digital terbukti memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan hasil riset Microsoft (2021) pada 2021, ekonomi digital akan menyumbang USD22 miliar terhadap PDB Indonesia.

Sejalan dengan itu, laporan dari *Temasek*, *Google*, dan *Bain & Company* (2020) menyebutkan, pertumbuhan ekonomi digital nasional menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada akhir 2019 dengan menyentuh USD40 miliar atau Rp566,28 triliun. Puncaknya, menurut laporan tersebut, pada 2030, diprediksi ekonomi digital kita akan terus naik dan menyentuh Rp4.531 triliun.

Bahkan, perkembangan pesat ekonomi digital nasional sudah diperkirakan 5 tahun yang lalu melalui hasil riset Oxford Economics (2016). Menurutnya, setiap satu persen peningkatan penetrasi *mobile* diproyeksikan menyumbang USD640 juta pada Indonesia.

Dalam konteks ini, memanfaatkan pasar digital diharapkan menjadi salah satu sektor yang mendongkrak perekonomian dalam negeri yang tengah melemah. Meskipun dalam situasi tak menentu ini, selayaknya masyarakat optimis bahwa perekonomian bangsa ini dapat pulih dan membaik setelah diterpa krisis multidimensi. ■

PERJUANGAN MENGEJAR MIMPI

*Jauh ku berjalan, tinggalkan semua.
Laut membentang, sungai bersilang, kampung
halaman, orang-orang tersayang.*
(Rapijali 1; Mencari)

RAPIJALI, ya buku ini berjudul Rapijali. Lalu apa itu rapijali? Rapijali adalah dunia imajinasi yang menjelaskan kisah perjalanan hidup seorang pemusik muda yang memiliki bakat istimewa.

Cerita dalam novel yang ditulis oleh nama asli Dewi Lestari yang kemudian dikenal dengan nama pena “Dee” ini sebenarnya telah dimulai sejak penulis berusia 17 tahun sejak dia lulus dari SMA. Penulis yang lahir di Bandung, 20 Januari 1976, cukup lama berkiprah di dunia penulisan, dan kali ini kita akan menyimak sedikit ulasan tentang salah satu karyanya yang berjudul *Rapijali*.

“Ping”, nama pemeran utama dalam novel ini merasa telah memiliki segala yang ia butuhkan. Dunianya yang damai di Pantai Batu Karas, rumahnya yang penuh alat musik di tepi Sungai Cijulang, seorang sahabat terbaik, serta kakek yang menyayangi.

Namun, diam-diam Ping menyimpan kegelisahan tentang masa depannya yang buram. Bakat musiknya yang istimewa tidak memiliki wadah, dan ia tidak berani bercita-cita.

Jalan hidup Ping dipaksa berubah ketika tiba-tiba saja ia harus pindah ke Ibukota. Ping harus tinggal bersama keluarga calon gubernur yang ia ketahui sebagai orangtua asuhnya. Ia pun melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah elit di Jakarta Selatan.

Hidup Ping penuh dengan tantangan, ketika ia harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga calon gubernur. Disana Ping menghadapi sekolah baru, teman yang belum dikenal, dan tentunya segudang tantangan baru.

Lelahnya hatiku mencoba pahami alasan ku di sini, di tempat yang asing, yang dingin, yang tak bersahabat... (Rapijali 1: Mencari)

Tinggal dengan penuh kemewahan seolah membuat dunia ping berbalik 180 derajat dari sebelumnya. Tetapi, di Jakarta dan di sekolah elit inilah, Ping justru menemukan harapan baru dengan bakat istimewa yang dimilikinya.

Ia dan beberapa orang teman barunya membentuk Rapijali yang merupakan akronim dari nama-nama anggota grup band pelajar tersebut.

Keberadaan Rapijali seolah memberikan kehidupan baru bagi Ping di tengah keterasingan Ibukota. Namun, baru sebentar ia mencecap gairah hidup dengan dunia musik dan teman-teman yang satu passion dengannya, Ping harus menghadapi masalah baru.

Kehidupan Gadis Batu Karas ini tidak sesederhana kisah anak asuh yang dibawa orangtua angkatnya pindah ke Ibukota. Ping akan menghadapi permasalahan yang lebih rumit, yang jawabannya baru kita ketahui jika kita membaca buku yang kedua.

Secara garis besar novel Rapijali berkisah tentang kehidupan gadis yang memiliki bakat bermain musik yang istimewa, genius dalam memainkan music yang diturunkan oleh kakeknya. Ping memiliki kehidupan yang sempurna, dengan orang-orang yang mencintainya.

Ada Yuda Alexander, kakek Ping yang mantan anggota grup band ternama yang kini membentuk grup band baru bersama teman-teman dan cucu semata wayangnya. Ada Oding, anak laki-laki seumuran Ping yang sudah seperti saudara baginya. Dan juga keluarga Mulyana yang memperlakukan Ping selayaknya anak gadisnya.

Kelebihan Novel

Dalam sebuah buku pasti ada kelebihan dan kekurangan, sama seperti buku ini juga mempunyai kelebihan. Dalam cerita yang ditulis oleh Dee Lestari ini sangat mengalir

dengan jalinan peristiwa yang runut, khas dengan karakter Dee yang sering menceritakan pengalamannya dalam tulisan.

Selain itu pemilihan diksi dengan porsi yang pas, tidak berlebihan namun juga tidak membosankan. Sangat pas untuk dibaca genre remaja hingga genre-genre di atasnya sekalipun. Dan penyajian cerita yang terasa pelan dan sangat hati-hati sehingga tidak seperti dipaksakan. Kecuali pada bagian akhir cerita saja.

Dalam pemilihan karakter, Dee memilih karakter untuk tokoh-tokoh dalam dunia ciptaannya. Selain karakter populer, Dee selalu memasukkan karakter yang tidak terduga dalam novelnya, sehingga para pembaca dibuat penasaran untuk membaca cerita selanjutnya.

Padanovel yang terbit ditahun 2021 ini, Dee sengaja tidak memberikan jawaban kepada pembaca dari akhir cerita dari permasalahan dan solusi yang dialami oleh para tokoh-tokohnya. Karena sepertinya Dee sengaja menjadikan seri ini sebagai pengenalan saja.

Selain itu, seluruh tokoh di sini memang sedang berusaha menemukan keinginan dan tujuan hidup, jadi, ibaratnya mereka ini masih galau dengan arah hidupnya, maka tak salah jika Dee memberikan judul “Mencari” untuk Rapijali seri pertama ini. Dari sini pula pembaca menantikan seri Rapijali yang kedua karena penasaran dengan sepak terjang enam anggota band gokil ini.

Selanjutnya kita dibuat penasaran dengan aksi panggung Rapijali dalam pertunjukan-pertunjukan berikutnya. Setelah lagu lawas milik

TIC Band dan lagu legendaris milik almarhum Benyamin Suaeb, kira-kira, lagu milik siapa lagi ya, yang bakalan diaransemen oleh Ping dan kawan-kawan?

Kekurangan Novel

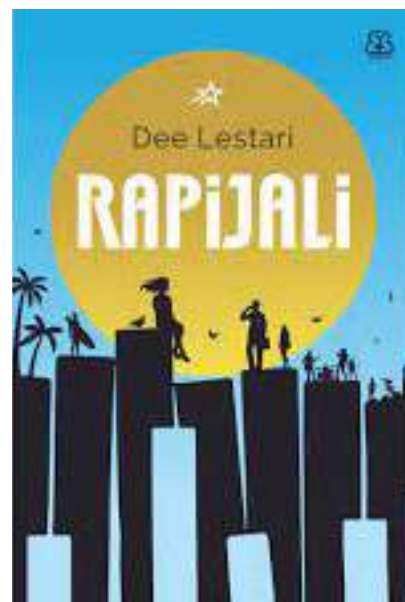
Selain mempuyai kelebihan, disini saya sebagai pembaca juga menemukan beberapa kekurangan setelah membaca novel ini, misalnya saja seperti.

Banyaknya pengenalan karakter dengan latar belakang masalah masing-masing, yang menurut saya sedikit rumit, dan berpotensi menimbulkan kekecewaan di akhir cerita. Selain itu pendalaman karakter tokoh-tokohnya masih kurang, namun sebagian tokoh tiba-tiba saja justru menghilang. Bisa jadi hal ini dikarenakan Rapijali dibuat tiga seri, sehingga Dee sengaja membuka sedikit demi sedikit karakter asli tokoh-tokohnya. Kemudian memunculkan kembali tokoh-tokoh yang sempat hilang.

Pada bagian akhir, novel dengan tebal 352 halaman ini terasa seperti dipaksa selesai alias dipenggal, sehingga rasanya sangat mengganjal. Memang benar buku ini merupakan seri pertama, tetapi tetap saja rasanya kurang “sreg” di bagian akhirnya.

Namun yang jelas dan tetap menjadi pertanyaan adalah mungkinkah ia menemukan apa yang hilang selama ini? Dan, apakah Ping siap dengan yang ia temukan? Bahwa hidupnya ternyata tak sesederhana yang ia duga.

Simak selengkapnya dalam buku ini dan nantikan kelanjutan cerita dalam Rapijali 2 dan selanjutnya. ■



Judul:

Rapijali 1: Mencari

Penulis :

Dee Lestari

Penerbit:

PT Bentang Pustaka

Tahun Terbit :

2021

Ketebalan :

352 hlm.

Peresensi :

Amir Rifa'i, Penikmat Novel dan
Staff Pengajar AIK Universitas
Muhammadiyah Malang

NO TIME TO DIE

Akhir Cerita Aksi Daniel Craig

ilm *No Time To Die* akhirnya rilis setelah kurang lebih ditunda selama satu setengah tahun. Penayangan film ini disambut senang oleh para penikmat film di dunia. Apalagi, sepanjang pandemi tidak banyak film bagus, bergenre detektif atau mata-mata yang tayang di bioskop. Sehingga penayangan film ini cukup memberikan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat dalam hal mendapatkan akses hiburan yang menarik.

Diceritakan dalam film ini, James Bond

(Daniel Craig) menjalani kehidupan seperti manusia biasa setelah memutuskan pensiun dari MI6. Ia tak lagi menjadi andalan atau menyandang status agen spionase dengan kode 007.

Kini, Bond kerap menghabiskan waktu sehari-hari dengan kekasihnya, Madeleine Swann (Lea Seydoux). Mereka hidup bahagia, terlebih ketika berlibur ke kota Matera, Basilicata, Italia.

Namun, liburan itu menjadi petaka ketika



Bond diserang Specter, organisasi yang ia lawan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menduga Swan terlibat dalam serangan itu karena hanya dia yang mengetahui keberadaannya.

Tanpa pikir panjang Bond langsung mengakhiri hubungannya dengan Swan. Ia bahkan menyatakan tidak ingin bertemu lagi meski Swan berharap bisa bertemu kembali dengannya di kemudian hari.

Kehidupan Bond mendadak sepi. Ia kemudian pindah ke Jamaika dan selama lima tahun tidak menjalin hubungan dengan siapa pun karena sebenarnya memang masih mencintai Swan.

Seketika Bond dihampiri oleh Felix Leiter (Jeffery Wright), temannya sekaligus agen CIA. Ia meminta bantuan kepada Bond untuk menyelesaikan sebuah misi di Kuba yang berkaitan dengan Spectre.

Sejak saat itu ia kembali beraksi sebagai spionase. Misi itu membuat Bond bingung karena ada sosok dan organisasi lain di balik Spectre yang berkuasa. Organisasi yang dipimpin Lyutsifer Safin (Rami Malek) itu bahkan memiliki senjata biologi yang sangat mematikan.

Hal itu membuatnya kembali bertemu dengan Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz), saudara angkat Bond sekaligus kepala organisasi Spectre. Namun, Bond tidak mendapat jawaban yang baik.

Mau tak mau, Bond harus menyelidiki organisasi misterius itu sendiri. Ia juga harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa membahayakan nyawanya.

No Time To Die merupakan film James Bond ke-25 sekaligus yang terakhir bagi Craig. Usianya sudah tua sehingga tak lagi sesuai dengan konsep si mata-mata yang 'abadi' di usia 33 tahun.

Produser Barbara Broccoli meminta media dan penggemar untuk berhenti berspekulasi tentang pemeran James Bond. Menurutnya, aktor pengganti Craig



baru akan diungkap setelah *No Time to Die* dirilis.

Ia bahkan mengaku tidak buru-buru memikirkan pengganti aktor Daniel Craig sampai tahun 2022. Broccoli ingin Craig menikmati waktu untuk selebrasi usai pensiun.

"Ya Tuhan tidak. Kami tidak memikirkannya sama sekali. Kami ingin Craig memiliki waktu untuk selebrasi. Tahun depan kami akan mulai memikirkan masa depan," kata Broccoli kepada BBC Radio yang dilansir Ace Showbiz, Selasa (28/9).

Ia mengaku beruntung bisa mendapatkan Craig untuk memerankan agen spionase berkode 007 itu sejak film *Casino Royale* (2006). Kala itu Craig menggantikan Pierce Brosnan yang terakhir membintangi *Die Another Day* (2002).

Broccoli merasa penampilan Craig selama ini membuat tim di balik layar benar-benar bisa mengeksplorasi kehidupan emosional Bond. Termasuk konflik dan kompleksitas dalam karakter Bond itu sendiri. ■

Melestarikan Seni Pertunjukan Wayang

Tak ada yang menyangkal bahwa negeri ini sangat kaya seni dan budaya. Dari dulu hingga kini, berbagai produk kesenian tersebar dari ujung Sabang hingga Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Seperti halnya di Pulau Jawa dan Bali, yang terkenal sering menyelenggarakan seni pertunjukan wayang.

Beberapa daerah di Jawa dan Bali masih sering ditemui pentas pertunjukan wayang hingga saat ini. Biasanya masyarakat setempat mengadakan pagelaran seni pertunjukan asli Indonesia ini pada momen-momen tertentu, seperti di pesta pernikahan, *khitanan*, atau memperingati hari Kemerdekaan.

Sebagai salah satu warisan budaya asli Indonesia, maka pada 7 November 2003 UNESCO menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka dari Tanah Air. Ia merupakan sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur (*masterpiece of oral and intangible heritage of humanity*). Kesohoran wayang dikenal hingga ke penjuru dunia.

Sesungguhnya ada banyak negara yang memiliki seni pertunjukan boneka. Hanya saja, wayang memiliki keunikannya sendiri terutama dalam hal bertutur. Di setiap pertunjukannya, kisah yang diceritakan selalu dibumbui dengan pesan-pesan moral. Dari itu, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memasukkannya ke dalam Daftar Representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia pada 11 tahun yang lalu.

Eksistensi wayang sebagai warisan budaya bangsa sudah ada jauh sebelum negara ini berdiri. Meski tidak ada satu kebenaran kapan pertama kali wayang muncul di Tanah Air, namun sejarah mencatat bahwa pertunjukan wayang telah dimulai sejak abad ke-4. Terselenggaranya pertunjukan wayang asal Prasasti Balitung yang berbunyi *Si Galigi Mawayang* menjadi fakta tak terbantahkan bahwa ia sudah ada sebelum negara-bangsa ini ada.

Sementara, pendapat lain ada yang menyebut bahwa seni pertunjukan boneka bayangan ini masuk ke nusantara lewat para saudagar Hindu asal India. Saat itu, seni pertunjukan wayang menjadi media yang efektif untuk menyebarkan agama Hindu, khususnya melalui cerita Ramayana dan Mahabarata. Menurut seniman asal Malang Denny Mizhar, jika dulu isi cerita pewayangan bermuatan nilai-nilai keagamaan, tapi kini ceritanya semakin berkembang.

“Seni pertunjukan wayang terkadang di pentaskan dengan cerita di era kontemporer, seperti persoalan sosial dan politik. Saya kira substansinya sama saja sebagai media yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai kebaikan,” kata Denny kepada *Majalah CaraPandang*, beberapa waktu lalu.

Terlepas dari kapan wayang mulai ada di Indonesia, sebagai sebuah negara yang berbudaya, pertunjukan seni wayang patut



dilestarikan. Pasalnya, generasi muda saat ini banyak yang tidak mengerti seni pertunjukan ini. Bahkan lebih ironis lagi tidak banyak juga di antara mereka yang mau mempelajarinya.

Minimnya minat kalangan muda untuk mempelajari salah satu warisan budaya ini tidak mululu kesalahan tertuju kepada mereka. Sebab, selama ini materi-materi pelajaran di sekolah tak sedikitpun yang menyinggung tentang keberadaan seni pertunjukan ini. Mestinya pendidikan kesenian diberikan secara maksimal agar generasi bangsa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Guru Seni Budaya Indonesia Dudi Maryadi mengatakan, selama ini yang dihadapi para guru untuk mengajarkan kesenian wayang selalu terbentur dengan jam pembelajaran yang sangat minim. Akibatnya, pesan-pesan cerita pewayangan yang

ingin diajarkan kepada siswa terbatas.

“Apalagi, siswa kerap merasa mudah jenuh bila diajarkan wayang yang bercerita tentang kisah-kisah klasik, baik Ramayana maupun Mahabharata. Untuk menjembatannya, kita mengajarkan konsep wayang yang berkultur pop, sehingga siswa tidak *boring*,” jelas Dudi.

Sebagai seorang pendidik seni dan budaya, lanjut Dudi, seni pertunjukan secara perlahan mulai ditinggalkan generasi muda sekarang. Hal itu dapat disaksikan pada setiap pagelaran wayang, di mana tidak ditemukan anak-anak muda yang menontonnya. Seni pertunjukan ini seolah masih menjadi tontonan bagi orang-orang tua.

Cerita pewayangan mesti dikontekstualkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di era sekarang. Dengan begitu, ada banyak anak muda yang meminati seni pertunjukan boneka bayangan ini. Yang lebih penting lagi agar wayang tetap lestari di bumi pertiwi. ■ **Nafik**



SATU KATA, BERAGAM BUDAYA

Pelajaran bahasa Indonesia yang kita peroleh di tingkat sekolah dasar hingga menengah dulu biasanya cukup membahas bahasa dalam lingkup internal. Artinya, aspek bahasa yang diudar berskala mikro. Ambil contoh perihal eufemisme dan metafora. Bapak/ibu guru kita hanya mengutarakan bahwa eufemisme dan metafora adalah salah satu jenis majas atau bentuk kiasan. Majas seperti itu lantas disebut paling pas digunakan untuk membikin puisi, cerpen, dan ragam karya sastra lainnya.

Namun, dalam kajian bahasa makro, eufemisme dan metafora tadi tak cukup memadai jika hanya dipahami sebagai entitas majas. Karena bersinggungan dengan politik, sosial, dan budaya, eufemisme dan metafora punya makna yang lebih jembar. Dalam kaitan dengan politik, misalnya, eufemisme (penghalusan) dan metafora (perbandingan) bisa dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Itulah yang kemudian diterakan sebagai bahasa politik.

Masih ingat dengan istilah homofon, homograf, dan homonim? Tiga kata ini galibnya juga pernah diajarkan di

bangku sekolah. Homofon adalah kata yang pelafalannya sama, tapi beda ejaan sekaligus maknanya. Contoh: *masa* dan *massa*, *sangsi* dan *sanksi*, *bang* dan *bank*. Homograf kebalikannya. Ejaannya sama, tapi lafal dan maknanya berbeda. Contoh: *teras* (inti sari) dan *téras* (bagian rumah).

Homonim paling unik, setidaknya bagi saya. Dulu, sewaktu sekolah, saya paling suka mencari bentuk-bentuk homonim: lafal sekaligus ejaannya sama, tapi maknanya bisa berlainan. *Hak* pada hak asasi manusia tentu berbeda dengan *hak* pada hak sepatu. Juga *genting* yang berarti atap dan *genting* yang bermakna gawat.

Nah, dalam tulisan ini, saya akan mewedar sejumlah kata yang sama, baik ejaan maupun pelafalannya, namun maknanya bisa berbeda bergantung situasi dan budaya yang melatarinya. Di perguruan tinggi, model begini bisanya masuk pada kajian sosiolinguistik.

Kata dan Budaya

Semakin dipelajari, bahasa kian memperlihatkan rimba raya nan luas. Bahasa dan budaya, misalnya. Keduanya ibarat dua sisi mata uang. Tak dapat dipisahkan. Di situ ada



Achmad San
Editor Bahasa Jawa Pos

bahasa, di situ pula budaya berkembang mengiringinya.

Satu kata yang bermakna wajar di satu daerah ternyata bisa bermakna tabu di daerah lain. Sebisa mungkin hindarilah berkata *butuh* di depan orang Melayu. Sebab, kata tersebut bermakna kemaluan laki-laki (zakar) menurut kebudayaan mereka. Sedangkan kita sudah menganggap *butuh* adalah sinonim dari *perlu*. Bahkan, orang Aceh juga paham bahwa *butuh* bermakna kemaluan laki-laki. Begitu pula bahasa Banjar di Kalimantan Selatan sana. Mereka juga akan ragu jika mendengar kata *butuh*, padahal yang dimaksud adalah *perlu*.

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Setiap daerah memang memiliki adat dan budaya, termasuk bahasa, yang berbeda-beda. Kata *momok* mungkin adalah hal yang wajar diucapkan sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Namun, jika Anda bergaul dengan orang Sunda, pasti responsnya sedikit berbeda. Sebab, *momok* dalam bahasa Sunda bukan berarti sesuatu yang menakutkan karena berbahaya, melainkan kemaluan wanita.

Kata *tempik sorak*, yang berarti berbagai pekik dan sorak, juga jangan serta-merta dipakai begitu saja apabila yang Anda ajak bicara adalah orang Jawa, misalnya. Pasalnya, di Jawa arti *tempik* sama dengan *momok* dalam bahasa Sunda. Memang konteks yang dimaksud bukan yang bermakna kasar itu. Namun, jika sudah mengetahui budaya mitra tutur, alangkah lebih baiknya menghindari kata-kata yang berpotensi menimbulkan ketabuan itu.

Antara Makian dan Kemesraan

Di desa saya, nun jauh di Trenggalek sana, kata *jancuk* tabu nian diucapkan. Entah bernada lirih atau kencang, kata itu dianggap sebagai bentuk pisuhan atau makian. Trenggalek termasuk daerah Mataraman bersama Tulungagung, Blitar, Kediri, Ponorogo, Pacitan, Madiun, Magetan, dan sebagainya. Karena itu, kata *jancuk* atau *cuk/cok* pamali diucapkan.

Tapi, di Surabaya, tempat tinggal saya selama ini, ujaran *jancuk* maupun *cuk/cok* baik-baik saja nasibnya. Malah

kerap dijadikan sebagai panggilan keakraban, bahkan kemesraan. Misalnya, "*Wah, nangdi, Cuk, kok suwe gak mrene?*" (Wah, ke mana saja, Cuk, kok lama tidak ke sini?). Alih-alih memperlihatkan ketabuan, kata itu menunjukkan suasana akrab di antara mitra tutur. Di Kota Pahlawan ini, sekalipun diucapkan dengan nada tinggi, kata *jancuk* dapat dipastikan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kecuali jika konteksnya adalah kemarahan.

Bahkan, seorang seniman dan budayawan Sujiwo Tejo lekat sekali dengan istilah Presiden Jancukers dan Republik Jancukers. Dalam buku *Jiwo J#ncuk*, Sujiwo Tejo menuliskan bahwa *jancuk* adalah ungkapan beragam, dari kemarahan sampai keakraban, bergantung situasi dan kondisi. Karena nuansa *jancuk* bisa diartikan dari marah sampai guyon, Sujiwo Tejo menganggap kata itu bagus untuk meredakan hati kala panas.

Dia mencontohkan beberapa kata *jancuk* di buku itu, seperti "*Kalo kita ceplas-ceplos gak munafik, Pak SBY bisa pidato sambil tertawa, jancuk aku gak takut Malaysia. Tapi masyarakat kok asal njeplak (bicara) aja.*" Sujiwo Tejo melanjutkan, *jancuk* lebih kaya nuansa daripada kata *asu* (anjing), *bajindul*. "*Kalo jancuk dianggep gak sopan, setop peringatan Hari Pahlawan 10 November, karena gak mungkin Bung Tomo dan arek-arek Suroboyo gak teriak jancuk,*" lanjutnya.

Karena itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Meskipun masih sama-sama Jawa Timur, satu kata bisa menimbulkan kesan yang berbeda sama sekali. Kata *jancuk* pada mulanya memang ekspresi pisuhan atau umpatan, namun mengalami perluasan makna sehingga dalam konteks tertentu malah menjadi pendukung suasana akrab atau mesra.

Padahal, jika dipendekkan menjadi *cuk*, artinya adalah anak nyamuk yang masih seperti ulat kecil-kecil hidup di dalam air. Adapun variasinya, *cok*, dalam bahasa Muyu (Papua) maknanya adalah kue sagu. Jadi, tak salah kalau seorang poliglot dengan sendirinya akan mampu memahami banyak budaya. Karena bahasa adalah pintu masuknya. ■

Bedah Rumah, Impian Ashanty Sejak Lama

Tidak semua orang yang memiliki kecukupan materi mau membagi sebagian hartanya kepada masyarakat yang tidak mampu. Apalagi, seseorang yang menjadi target pemberian itu bukan bagian dari keluarga atau teman dekat. Ini pasti sulit, butuh kesadaran khusus agar seseorang memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Namun, tidak bagi Ashanty. Nama besarnya sebagai artis justru tidak membuat istri dari Hermansyah tersebut malu dan berat hati untuk membagikan sebagian hartanya kepada orang yang tidak mampu.

Justru, bagi dia, memberikan sebagian harta ke orang lain yang lebih membutuhkan adalah panggilan hati. Sebab itu, tak masalah baginya untuk berbagi kebagahagiaan dengan mendermakan materi yang dimilikinya kepada orang lain.



Tidak tanggung-tanggung, Ashanty belum lama ini melakukan aksi sosial dengan memberikan bantuan bedah rumah kepada seorang warga tidak mampu di Mojokerto, Jawa Timur. Meski tidak mengenalnya, Ashanty dengan ikhlas dan senang hati menyisahkan sebagian keayaannya untuk orang yang lebih membutuhkan.

Dia merasa senang bisa melakukan hal baik itu. Bagi dia atau orang yang berkecukupan, mungkin bedah rumah itu tidak berdampak apa-apa, tapi bagi orang yang selama ini hidup di bawah garis kemiskinan, perbaikan rumah layak huni itu sungguh membahagiakan.

“Jadi Alhamdulillah kemarin aku ke Mojokerto buat bedah rumah Pak Buadi yang enggak layak buat ditinggalin,” kata Ashanty di Jakarta, Kamis (21/10).

Membedah rumah agar layak huni kepada warga tak mampu, kata Ashanty, merupakan impiannya sejak 10 tahun lalu saat dirinya membuat Yayasan The Hermansyah. Lembaga ini didirikan bukan untuk kepentingan keluarganya, justru diinisiasi untuk membagi kebahagiaan dengan orang lain.

Niat untuk membedah rumah itu kerap terkendala karena berpikir ingin lebih mendahulukan kegiatan sosial yang bermanfaat untuk banyak orang.

“Sebenarnya konten sosial dari Yayasan The Hermansyah sudah dari 10 tahun lalu sudah jalan, dan setiap mau bedah rumah mikirnya nanti dulu deh, buat banyak orang dahulu, daripada satu rumah,” tuturnya.

Selain itu, Yayasannya juga hanya mengandalkan uang pribadi. “Karena cari sponsor kan susah, jadi 10 tahun kegiatan sosial itu pakai uang pribadi,” kata Ashanty.

Impian memberikan bantuan bedah rumah akhirnya terwujud ketika salah satu rekan Ashanty bersedia ikut membantu.

“Kemarin aku ketemu sahabat di Surabaya namanya Jessica, akhirnya

kita ngobrol aku sampein, aku mau bedah rumah. Terus dia bilang, ‘Bun bareng aja sama aku, aku mau’. Akhirnya dapet lah bedah rumah di Mojokerto, rumah pak Buadi,” tuturnya.

Pilihan melakukan aksi sosial bedah rumah di kawasan Mojokerto, Jawa Timur, menurut Ashanty bukan tanpa alasan.

“Kenapa di Mojokerto karena kakekku asli orang Mojokerto. Aku ingin bikin sesuatu di sana. Akhirnya ketemu rumah Pak Buadi yang lantainya masih tanah. Bikin dalam dua minggu udah jadi rumahnya. Senin besok aku akan ke sana untuk serah terima kunci,” tukasnya.



Pilihan Ashanty untuk berderma jatuh pada rumah Pak Buady, karena huniannya itu sudah tidak layak ditempati. Dia dan keluarganya tinggal berlantaian yang alasnya tidak berlantai dan atapnya hanya pakai triplek, yang jika hujan pasti bocor ke mana-mana. Apalagi, Pak Buadi sehari-hari bekerja sebagai pengembala yang pendapatan per harinya tidak ada.

Padahal, rumah di sampingnya adalah rumah bertembok yang sudah bagus dan layak huni. Sebab itu, penting sekali mendermakan sebagian harta untuk kesenangan dan kebahagiaan orang lain. ■

Isu Retak di Keluarga Shandy Aulia

Beberapa waktu belakangan ini, publik dikejutkan dengan kabar perceraian yang datang dari rumah tangga Shandy Aulia dan David Herbowo. Pasangan yang sudah menikah selama 10 tahun terakhir itu dikabarkan telah bercerai.

Kabar bermula dari halaman *Instagram* Shandy Aulia. Di situ, ia tak lagi memajang bio 'A Wife' seperti yang sudah menjadi ciri khasnya. Tak berhenti sampai di situ, Shandy juga jarang mengunggah foto sang suami.

Tentu saja kabar perceraian tersebut membuat netizen terkejut. Pasalnya, belum lama ini, Shandy dan David baru saja dikaruniai seorang buah hati pasca penantian panjang mereka.

Caption yang ditulis Shandy di postingan terbarunya juga menimbulkan pertanyaan baru. Di postingan terbaru, Shandy Aulia tampak mengunggah foto terbaru bareng *baby* Claire. Ia tampak menulis sebuah *caption* panjang yang penuh arti.

"*Just the two of us* (hanya kita berdua)," tulis Shandy Aulia, seperti dilansir dari akun *Instagram*-nya (07/10).

"Memang kita tidak tahu bagaimana akhir



dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri,” lanjutnya.

Tentu saja, *caption* yang ditulis Shandy Aulia ramai disorot oleh netizen. Beberapa mulai menduga kalau isu perceraian tersebut bukan sekadar gosip. “*Ya Allah ternyata bener mereka mau pisah,*” tulis salah satu netizen.

Dikenal sebagai salah satu artis yang selalu menjaga privasi tentang keluarga dan kehidupan pribadinya, Shandy Aulia pun sukses membuat banyak orang penasaran. Para fans dan *followers*-nya di *Instagram* pun tak berhenti mendoakan keutuhan rumah tangganya bersama David Herbowo.

Tak lama setelah rumor perceraian viral, Shandy pun memutuskan untuk buka suara. Lawan main Dodit Mulyanto dalam film “Cinta Itu Buta” ini memohon pengertian dari rekan-rekan wartawan.

“*With my humble heart*, saya mohon untuk rekan-rekan wartawan yang terhormat, dengan kerendahan hati saya meminta untuk tidak datang meliput di area privasi rumah saya ataupun keluarga besar saya,” tulisnya.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Shandy Aulia pun menambahkan, “Berikan ruang dan waktu untuk saya pribadi, perihal berita yang beredar adalah hak ranah yang sangat pribadi untuk saya. Saya mengerti dan menghormati pekerjaan rekan-rekan wartawan, namun saya memohon untuk menghormati hak privasi saya sebagai manusia.”

“Terlebih area rumah saya memiliki privasi bagi tetangga di sekitar rumah saya.

Mohon untuk tidak mengambil gambar atau video rumah/property pribadi saya dan keluarga untuk dipublikasikan. Terima kasih yang sebenar-benarnya,” pungkas Shandy.

Tak pelak postingan ini langsung sukses menyita perhatian netizen. Berbagai dukungan pun dituliskan Shandy, terutama para fans yang lebih memilih untuk menunggu waktu yang tepat jika nantinya Shandy mau buka suara dengan sendirinya.

Hingga saat ini, Shandy memang belum memberikan tanggapan langsung terkait kebenaran rumor perceraian yang beredar. Dalam *live* terbarunya di *Instagram*, ia juga hanya menjelaskan soal produk *night skincare routine*, dan tak menjawab rasa penasaran netizen akan kabar perceraian.

Kita mendoakan semoga keluarga Shandy baik-baik saja. Apa yang akan dipilih oleh Shandy dan David semoga menjadi pilihan yang terbaik. Dengan kedatangan *baby* Claire, pastilah keluarga muda ini akan bertambah kebahagiaan dan bukan yang terjadi malah sebaliknya.

Bagi public atau netizen, tak perlu lagi mengusik dan mempertanyakan hal pribadi keluarga Shandy. Biarkanlah keluarga ini menyelesaikan problem internalnya, tanpa dipengaruhi sesak oleh berbagai komentar yang bertebaran di media sosial.

Kita tunggu saja *happy ending*-nya seperti lanjutan episode kedua dalam filmnya bersama Dodit di “Cinta itu Buta” yang dikonfirmasi oleh keduanya dalam podcast Dodit “Aku Pengen Ngomong Sama Kamu” belum lama ini. ■

Bisa Transaksi Apa Aja, Dimana Aja, Kapan Aja

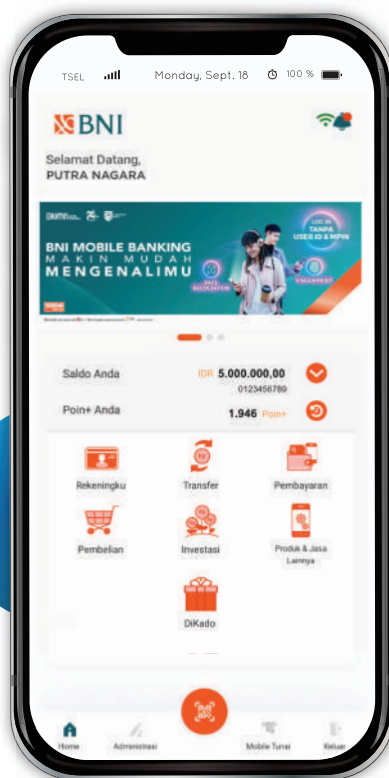
**Top Up
Uang Elektronik**



**Beli
Paket Data
& Pulsa**



**Beli Voucher
& Bayar Listrik**



**Bayar
Kartu Kredit**



Transfer



Bayar Tagihan

Download Sekarang di :

